

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2022



Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

2022



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR 2022

No.Publikasi : 35550.1911

Katalog BPS : 4102002.35

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 65 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan Oleh:

©BPS Provinsi Jawa Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR 2022

Pengarah:

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.

Penyunting:

Ir. Nurul Andriana, M.E.

Evy Trisusianti, S.Si., M.T., M.Sc.

Penulis dan Pengolah Data:

Joko Ade Nursiyono, S.ST

Akhmad Dardiri, S.ST., MM

Desain Kover dan Tata Letak:

Joko Ade Nursiyono, S.ST

<https://jatim.bps.go.id>



Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator *outcome* kinerja pembangunan secara menyeluruh dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur Panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Ketiga indikator tersebut teragregasi dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajikan angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui hasil pembangunan manusia baik pencapaian maupun disparitas antar daerah. Dengan mengetahui capaian pembangunan manusia di seluruh wilayah, diharapkan setiap daerah termotivasi untuk memperbaiki kinerja pembangunan melalui pendekatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia di Jawa Timur yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2022” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk sebagai bahan rujukan masyarakat. Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini. Saran dan masukan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan lebih baik di masa yang akan datang.

Surabaya, Juni 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si



Daftar Isi

	Hal
1. Pendahuluan	1
2. Metodologi	11
3. Potret pembangunan Manusia	23
4. Pembangunan Manusia di Jawa Timur	27
5. Kesehatan	33
6. Pendidikan	43
7. Kehidupan yang Layak	51
8. Indeks Pembangunan Gender	59
Lampiran	61

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral (*people centered development*), sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Maka dalam kerangka ini perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa), sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini secara implisit juga mengandung makna pemberdayaan penduduk baik sebagai subyek pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.



Gambar 1.1 Pertunjukan Kesenian Wayang Kulit
Sumber: nurulhidayah6771.blogspot.com

“Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator *outcome* pembangunan nasional dengan manusia itu sendiri sebagai obyek pembangunan”

1

Pendahuluan

Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (HDR, 1990).

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan – pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Di antara pilihan yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan manusia juga meningkatkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan semua aspek tersebut agar kesejahteraan dapat tercapai dengan baik. Inilah mengapa di dalam proses pembangunan, manusia tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri.



Gambar 1.2 Para Siswa Mengikuti Lomba Gerak Jalan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

“Membangun manusia berarti membangun harapan berumur panjang, sehat, pilihan pendidikan yang berkualitas serta menjamin kesejahteraan ekonomi dengan pemerataan pendapatan”

Pendahuluan

1

Pembangunan manusia jika dilihat dari sisi pelaku dan sasaran merupakan model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tentang penduduk : Berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial budaya lainnya.
2. Untuk penduduk : berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri.
3. Oleh penduduk : berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama :

1. Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi



Gambar 1.3 Pasukan Pengibar Bendera

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

“Tiga unsur utama yang menjadi landasan pembangunan manusia di Indonesia adalah tentang kependudukan, untuk penduduk itu sendiri, dan dilaksanakan oleh penduduk”

1

Pendahuluan



Gambar 1.4 Pawai HUT RI Kabupaten Sidoarjo

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

“Empat komponen utama paradigma pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, berkelanjutan, serta pemberdayaan”

dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang atau kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumberdaya fisik harus dapat diperbaharui. Karena generasi yang akan datang merupakan generasi penerus yang tentu juga butuh menikmati hasil pembangunan. Aspek keberlanjutan pembangunan ini merupakan upaya agar generasi masa depan semakin merasakan dampak positif pembangunan.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Semua orang harus mengambil peran dan fungsi masing-masing sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih cepat disertai oleh pengawasan agar lebih tepat sasaran.

Aspek pemberdayaan dalam proses pembangunan akan menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan. Monitoring dan evaluasi pembangunan juga dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga kebijakan yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Pendahuluan

1

1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah (UNDP, 1998). Dalam hal ini IPM pada tahun tertentu merupakan gambaran dari upaya pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga upaya pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besarnya IPM pada awal periode tersebut.

Agar hasil pembangunan antar daerah dapat dibandingkan, maka dibutuhkan alat ukur hasil pembangunan manusia tersebut. Pada masa sebelum tahun 1970-an alat ukur akan keberhasilan pembangunan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenyataannya, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), namun taraf hidup penduduknya tidak ikut meningkat. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia. Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Inilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.



Gambar 1.5 Aktivitas Belajar Mengajar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Tantangan pembangunan suatu negara adalah bagaimana hasil dari pembangunan itu dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.

1

Pendahuluan



Gambar 1.6 Aktivitas Belajar Mengajar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ringkasan mengenai tingkat kemajuan sosial dan ekonomi dan berfungsi sebagai indikator evaluasi tiga dimensi dasar, lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak”

Sejak tahun 1990, angka IPM telah menjadi salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam laporan yang dirilis oleh UNDP. Dalam laporan tersebut, 187 negara yang tercakup di dalamnya sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM-nya, yaitu kelompok sangat tinggi, kelompok tinggi, kelompok menengah, dan kelompok rendah.

IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/provinsi/kabupaten/kota dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (UNDP : *Human Development Report 2001*).

Lebih lanjut UNDP menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya memberi indikasi saja. Tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.

Pendahuluan

1

Tinggi rendahnya nilai IPM dapat menjelaskan pertumbuhannya. Ini menandakan kualitas atau *outcome* pembangunan. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan dalam jangka menengah, publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2016-2022. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan potret atau deskriptif suatu wilayah baik secara komprehensif maupun secara sektoral berdasarkan capaian pembangunan manusianya.

Analisis deskriptif pembangunan manusia yang disajikan merupakan gambaran tentang keadaan pembangunan manusia, yaitu gambaran yang tidak saja berkaitan dengan gambaran capaian tentang kesejahteraan dan kualitas fisik sumber daya manusia, tetapi juga gambaran yang berkaitan dengan berbagai aspek sosial dari penduduk.

Dengan adanya penggambaran ini pengambil keputusan dan perumus kebijakan akan dapat bekerja secara lebih mendasar dan lebih terarah. Penentuan prioritas misalnya dapat dilakukan secara lebih mudah, oleh karena berbagai informasi yang diperlukan pada proses perencanaan pembangunan telah tersedia.



Gambar 1.7 Aktivitas Belajar Mengajar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

“Pembangunan manusia pada dasarnya menggambarkan dampak pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan perekonomian”

1

Pendahuluan

1.3. Ruang Lingkup

Secara khusus, publikasi ini menyajikan:

1. Metodologi pengukuran pembangunan manusia;
2. Pencapaian Pembangunan Manusia di Jawa Timur;
3. Analisis tipologi Klassen (Analisis Kuadran) capaian pembangunan manusia di Jawa Timur;
4. Kesimpulan sebagai ulasan penutup termasuk saran atau masukan kepada *stake holder*.



Gambar 1.8 Aktivitas Belajar Mengajar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

1.4. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan publikasi ini adalah menyajikan informasi atau mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja daerah dalam bidang pembangunan manusia sesuai dengan perspektif UNDP di Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Adapun beberapa manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

“Suatu negara yang berhasil membangun manusianya, berarti negara itu sudah berhasil merencanakan sekaligus membangun masa depannya”

Pendahuluan

1

- ◆ IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Peringkat tersebut bukan sekadar angka semata, namun benar-benar menggambarkan capaian suatu wilayah atau negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- ◆ Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagai rapor kinerja Gubernur yang tertuang dalam LKPj Gubernur.

IPM merupakan indikator utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur maupun Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya data IPM dalam menyusun laporan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

IPM Metode Baru

Metode baru penghitungan IPM, Angka Melek Huruf (AMH) diganti Harapan Lama Sekolah (HLS), PDB diganti dengan PDB per Kapita, dan menggunakan rumus rata-rata Geometrik



Dimensi IPM

Dimensi Kesehatan

Dimensi ini diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH)



Dimensi Pendidikan

Dimensi ini diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

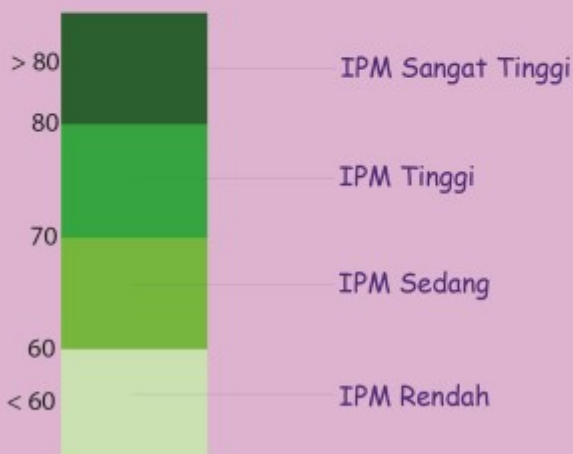


Dimensi Pengeluaran

Dimensi ini diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan 96 komoditas, terdiri atas 66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan



Klasifikasi Angka IPM

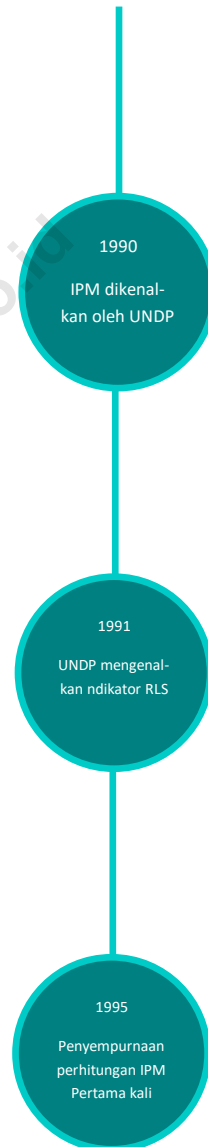


2.1. Perubahan Metodologi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB, yaitu UNDP (*United Nation Development Programme*). Pada saat itu, indeks komposit ini dihitung dengan pendekatan tiga dimensi, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup saat lahir), dimensi pengetahuan (angka melek huruf dewasa) dan dimensi standar hidup layak (PDB Per kapita). Ketiga dimensi tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik sehingga diperoleh suatu indeks pembangunan manusia.

Tidak lama berselang, yaitu pada tahun 1991, UNDP menambahkan indikator rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Bobot kedua indikator dalam dimensi pengetahuan diberikan berbeda; indikator angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, dan indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot satu pertiga.

Penggunaan empat indikator dalam dimensi-dimensi penghitungan IPM tersebut bertahan terhadap perkembangan jaman hingga tahun 1994. Karena pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan dalam proses penghitungan IPM dengan mengganti komponen rata-rata lama sekolah dengan kombinasi angka partisipasi kasar.



2

Metodologi



Satu dekade dari tahun diluncurkannya, IPM mengalami perubahan yang signifikan dalam proses penghitungannya. Pada tahun 2010, atas dasar rekomendasi dari para ahli, UNDP mengubah metodologi penghitungan IPM. Sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai IPM Metode Baru.

Dalam metodologi baru, IPM dihitung dari dimensi yang sama namun dengan indikator yang telah diperbaharui sesuai kondisi kekinian yang lebih relevan. Misalnya saja, indikator dalam dimensi pengetahuan, angka melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah, dan dalam dimensi hidup layak, indikator PDB perkapita diganti dengan PNB perkapita.

Perubahan yang dilakukan oleh UNDP terhadap penghitungan IPM didasari atas kebutuhan bahwa suatu indeks komposit seperti IPM harus mampu menjadi alat ukur yang tepat, dengan pemilihan variabel dan metode yang akurat.

Dua hal yang paling esensial terhadap perubahan IPM adalah perubahan pada variabel angka melek huruf dan PDB per kapita dan perubahan metode penghitungan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) diyakini sudah tidak tepat lagi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pembangunan manusia dari segi kualitas pendidikan.

Hal ini dikarenakan pada saat sebelum perubahan metode IPM, AMH di beberapa wilayah di Indonesia sudah tinggi dan tidak lagi dapat menjadi pembeda antar wilayah. Dengan demikian dianggap bahwa AMH adalah variabel yang tidak sensitif membedakan, dan dalam hal indeks komposit, variabel ini menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan pada dimensi pendidikan untuk menghitung IPM.

Indikator kedua yang diganti dalam perubahan metode IPM adalah PDB per kapita. Indikator ini sewajarnya memberi gambaran tentang perkiraan pendapatan masyarakat. Namun yang terjadi adalah dikarenakan PDB terbentuk dari seluruh faktor produksi, baik yang berlangsung dari dalam negeri hingga dari adanya investasi asing. Dalam arti, nilai tambah yang dihasilkan masih dinikmati oleh non-residen sehingga masih bruto.

Kenyataannya, tidak semua pendapatan dari faktor produksi yang terlibat dalam PDB akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri secara luas. Sehingga disimpulkan bahwa PDB per kapita menjadi tidak sesuai untuk mencerminkan kesejahteraan suatu masyarakat di suatu wilayah. Oleh sebab itu, indikator yang terdapat dalam dimensi standar hidup layak digantikan dengan indikator pengeluaran per kapita.

Angka Melek Huruf dihapus

PDB digantikan oleh PDB per kapita

Rata-rata aritmatik diganti rata-rata geometrik

2

Metodologi

Rata-rata geometrik diyakini dapat mengakomodir kekurangan pada hasil penghitungan IPM dengan menggunakan rata-rata aritmatik.

Rata-rata geometrik merupakan rata-rata yang mampu meminimalisir nilai-nilai ekstrem. Dalam artian, rata-rata ini relatif lebih *robust* dibandingkan rata-rata aritmatik yang besar kemungkinan dipengaruhi oleh indeks penyusun IPM yang ekstrem.

Sebagai simulasi sederhana, apabila indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran bernilai 1, 3, dan 12, dengan rata-rata aritmatik menghasilkan nilai IPM sebesar 5,33. Berbeda dengan nilai IPM dengan rata-rata geometrik yang hasilnya sebesar 3,30.

Selain perubahan pada indikator pembentuk IPM, perubahan lainnya yang merombak penghitungan IPM menjadi lebih relevan dengan kondisi terkini adalah penggunaan rumus rata-rata/agregat dari ketiga komponen. Awalnya, IPM dihitung dengan formula rata-rata aritmatik, di mana jika suatu dimensi pembentuk mencapai titik yang rendah dapat ditutupi oleh dimensi lain yang mencapai titik yang tinggi.

Contoh sederhana dari kurang sempurnanya penggunaan rata-rata aritmatik: jika capaian dimensi sehat dan umur panjang, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak, masing-masing bernilai 1, 3, dan 5, maka rata-rata aritmatiknya adalah 3.


Pada hal jelas terlihat adanya ketimpangan antardimensi pembentuk, namun ketika diagregatkan tidak terlihat atau tertutupi oleh dimensi yang bernilai tinggi. Hal ini justru bertentangan dengan konsep dan tujuan pembangunan manusia. IPM yang ideal adalah yang menjunjung pemerataan dalam pembangunan manusia atau dengan kata lain anti terhadap ketimpangan pembangunan.

Atas dasar inilah kemudian metode penghitungan rata-rata ketiga dimensi IPM diganti dengan menggunakan rata-rata geometrik. Pada formula pengganti ini, setiap dimensi berbobot sama dan tidak memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi yang bernilai tinggi ke dimensi yang bernilai rendah.


Mengapa metodologi IPM diubah?

Adapun beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi penghitungan IPM adalah:


1. Beberapa indikator sudah tidak tepat dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf sudah tidak lagi relevan dalam mengukur Pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka Melek Huruf sebagian besar daerah di Indonesia sudah tinggi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan pembeda tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. PDB merupakan indikator yang masih bersifat makro dan merupakan agregat dari PDB kemudian dibagi dengan seluruh populasi penduduk pertengahan tahun.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Rumus aritmatika yang merupakan rata-rata hitung dipengaruhi oleh salah satu dimensi yang nilainya lebih tinggi sehingga tidak relevan dalam menggambarkan capaian setiap dimensi yang digunakan dalam penghitungan IPM.



Metodologi
IPM diubah
karena?



Beberapa
indikator
tidak tepat



PDB tidak
relevan
dengan pen-
dapatan

2

Metodologi

Komponen yang berubah pada metode IPM Baru

1

AMH diganti AHS

2

PDB per kapita diganti PNB per kapita

3

Rata-rata aritmatik diganti Rata-rata geometrik

Apa saja yang berubah?

Indikator

1. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode Penghitungan

1. Metode agregasi dengan rumus rata-rata hitung atau aritmatik diubah menjadi rata-rata ukur atau geometrik untuk menghilangkan pengaruh pencilan atau *outlier* pada hasil penghitungan indeks.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan memasukkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan pada bidang pendidikan dan perubahannya.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010);
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran RLS juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan rantang usia 15 – 25 tahun;
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diprosi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data Susenas;
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah sebagai acuan.

Umur Harapan
Hidup (UHH)

Proyeksi Sensus
Penduduk 2010

Dimensi
pengetahuan

Hasil Survei So-
sial Ekonomi
Nasional
(Susenas)

PNB per kapita

Hasil Survei So-
sial Ekonomi
Nasional
(Susenas)

Penentuan
nilai maksi-
mum dan mini-
mum

Standar maksi-
mum dan mini-
mum UNDP

2

Metodologi

Dimensi IPM sama halnya dimensi yang digunakan pada IPM Metode Baru, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran.

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam penghitungan IPM, setiap komponen distandarisasi dengan nilai maksimum dan minimum. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk masing-masing indikator. Untuk standarisasi kebutuhan hidup layak menggunakan nilai rupiah sehingga dapat dibandingkan secara nasional. Tabel di samping menyajikan standar nilai maksimum dan minimum tersebut.

Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

*) daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

**) daya beli maksimum nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran (standar hidup layak). Penghitungan IPM dilakukan dengan menentukan nilai untuk setiap dimensi, kemudian diagregasi.

Dimensi kesehatan

Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH mencerminkan derajat kesehatan masyarakat sebagai suatu indikator mengenai peluang lama usia hidup. UHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk SP2010 yang dilakukan secara tidak langsung melalui paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$



Gambar 2.1 Aktivitas Belajar Mengajar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dimensi pendidikan

Dimensi pendidikan atau bisa disebut juga dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau disebut juga *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau disebut juga *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indeks pengetahuan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tingkat pendidikan Jawa Timur yang semakin meningkat menjadikan dimensi pendidikan menjadi salah satu pemicu tingginya angka IPM Jawa Timur.

2

Metodologi

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Di mana:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$



Gambar 2.2 Pasar Tradisional

Sumber: tugasmakalahku.blogspot.com

Dimensi pengeluaran

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan (riil) dengan tahun dasar 2012 sama dengan 100.

Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditasnya merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Adapun Teknik penghitungan paritas daya beli ini menggunakan teknik Rao. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP). Sedangkan pada metode baru, dipilih sebanyak 96 komoditas dalam penghitungan PPP dengan pertimbangan bahwa *share* 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1999 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Indeks pengeluaran (standar hidup layak) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Dimensi pengeluaran diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita konstan dengan tahun dasar 2012 sebagai 100. Rata-rata tersebut dibuat konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai pengeluaran. Dan selanjutnya agar terbanding antar wilayah, digunakanlah harga-harga Jakarta Selatan sebagai acuan utama.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

Penghitungan IPM

IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Ukuran Kecepatan IPM

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik. Umumnya, wilayah dengan IPM yang tinggi sudah mencapai pertumbuhan marginal sehingga kecepatannya semakin mengecil.



Gambar 2.3 Pasar Ikan

Sumber: anekapasarindonesia.blogspot.com

Sebelum terjadi perubahan dalam penghitungan IPM, salah satu alat analisis yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia di setiap wilayah di Indonesia adalah reduksi *shortfall*. Ukuran ini digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan manusia suatu wilayah dibandingkan dengan targetnya.

2

Metodologi

Setelah terjadi perubahan metode penghitungan IPM, ukuran yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia suatu wilayah adalah kecepatan IPM dengan menghitung pertumbuhannya.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian pada periode sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka dapat dikatakan IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya semakin cepat.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Di mana: IPM_t : adalah IPM suatu wilayah pada tahun ke- t ; IPM_{t-1} : adalah IPM suatu wilayah pada tahun ke- $t-1$;

Pengklasifikasian Pembangunan Manusia Berdasarkan IPM

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah menurut pembangunan manusianya. Adapun capaian IPM suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 80)
2. Tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 70 dan kurang dari 80)
3. Sedang (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 70)
4. Rendah (Angka IPM kurang dari 60)



Gambar 2.4 Aktivitas Karyawan Pabrik

Sumber: [jasaoutsourcingdiawatimur.blogspot.com](https://jati.m.bps.go.id)

3.1. Hakikat Pembangunan

Hakikat utama pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Terlebih lagi, fokus tujuan nasional 2019-2024 salah satunya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Maju.

Tanpa peningkatan kualitas SDM, pembangunan yang telah dilakukan selama ini akan sia-sia. Sayangnya, masih banyak orang berpendapat bahwa pembangunan yang utama adalah pembangunan fisik atau infrastruktur.

Pembangunan yang hakiki itu adalah pembangunan yang berimplikasikan peningkatan kualitas manusia bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan menjadi tidak berarti jika masyarakat tidak ikut andil dalam keseluruhan proses pembangunan. Rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk mewujudkan itu, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan berkualitas. Pembangunan di beberapa negara maju sangat ditopang oleh masyarakat bersumber daya manusia yang baik. Pembangunan di negara-negara maju jauh lebih berhasil dibanding negara lainnya karena didukung oleh sumber daya manusia yang sangat berkualitas.



Gambar 3.1 Pelatihan Komputer

Sumber: nickyunn.blogspot.com

Pembangunan melibatkan manusia sebagai subyek, predikat, dan obyek. Manusia sebagai subyek berarti manusia terlibat dalam melakukan perencanaan pembangunan. Manusia sebagai predikat berarti manusia sebagai eksekutor pembangunan. Manusia sebagai obyek berarti manusia sebagai sasaran pembangunan dan manusia pula yang menikmati hasil pembangunan itu.

3

Potret Pembangunan Manusia



Gambar 3.2 Olahraga Senam untuk Masyarakat

Sumber: kodimkudus.blogspot.com

Kesejahteraan akan tercapai apabila suatu pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberi dampak positif pada aspek kesehatan, pendidikan, serta kehidupan yang layak. Aspek kesehatan yang positif ditunjukkan dengan Umur Harapan Hidup yang lama, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang tinggi, serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa yang stabil.

Kualitas manusia suatu bangsa sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, utamanya aspek kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga aspek tersebut menjadi penentu kuantitas sekaligus kualitas manusia sebagai dampak pembangunan. Pembangunan menjadi sangat berarti jika ketiga aspek tersebut juga dapat dinikmati masyarakat seiring percepatan perkembangan pembangunan daerah.

Kesejahteraan akan dirasakan masyarakat jika pembangunan yang terjadi dapat memberikan implikasi pada tercapainya umur panjang dan sehat, pendidikan atau pengetahuan semakin meningkat, serta kehidupan yang layak secara ekonomi.

3.2. Pembangunan Jawa Timur

Terkait pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas SDM.

Berbagai program peningkatan pembangunan yang membawa kualitas manusia telah diupayakan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pembangunan infrastruktur juga terus digulirkan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Terlihat jelas bahwa sejak 2016, IPM Jawa Timur menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2016, IPM Jawa Timur masih berada pada angka 69,74. Dalam kurun waktu 7 tahun, IPM Jawa Timur mampu mencapai angka 72,75 poin

Potret Pembangunan Manusia

3

pada tahun 2022. Data ini menunjukkan dampak positif program pemerintah Jawa Timur baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat sebagai obyek pembangunan.

Rata-rata kenaikan IPM Jawa Timur setiap tahunnya mencapai 0,54 poin sejak 2016 sampai 2022. Artinya, kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita cukup baik. Selain menjadi prestasi, kondisi di atas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Timur bagaimana capaian IPM setiap tahunnya dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan yang tecermin dari pelayanan masyarakat dan mempermudah akses pendidikan, kesehatan, sehingga *multiplier effect*-nya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung hingga, efeknya terhadap IPM belum signifikan. Walaupun di tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun Jawa Timur menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi secara agregat IPM tetap meningkat.

Tahun 2022 pasca pandemi Covid-19, IPM Jawa Timur tetap meningkat dengan didongkrak oleh peningkatan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar 2,43 persen. Kondisi ini tercatat sebagai pemulihan setelah pandemi Covid-19 yang pada tahun 2020 yang berdampak pada pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dengan penurunan sebesar 1,18 persen.



Kesejahteraan akan tercapai apabila suatu pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberi dampak positif pada aspek kesehatan, pendidikan, serta kehidupan yang layak. Aspek kesehatan yang positif ditunjukkan dengan Umur Harapan Hidup yang lama, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang tinggi, serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa yang stabil.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI JAWA TIMUR 2022



“

Pada tahun 2022, capaian pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75

”

Komponen IPM



Umur Harapan Hidup saat Lahir:

71,74 tahun

Harapan Lama Sekolah:

13,37 tahun

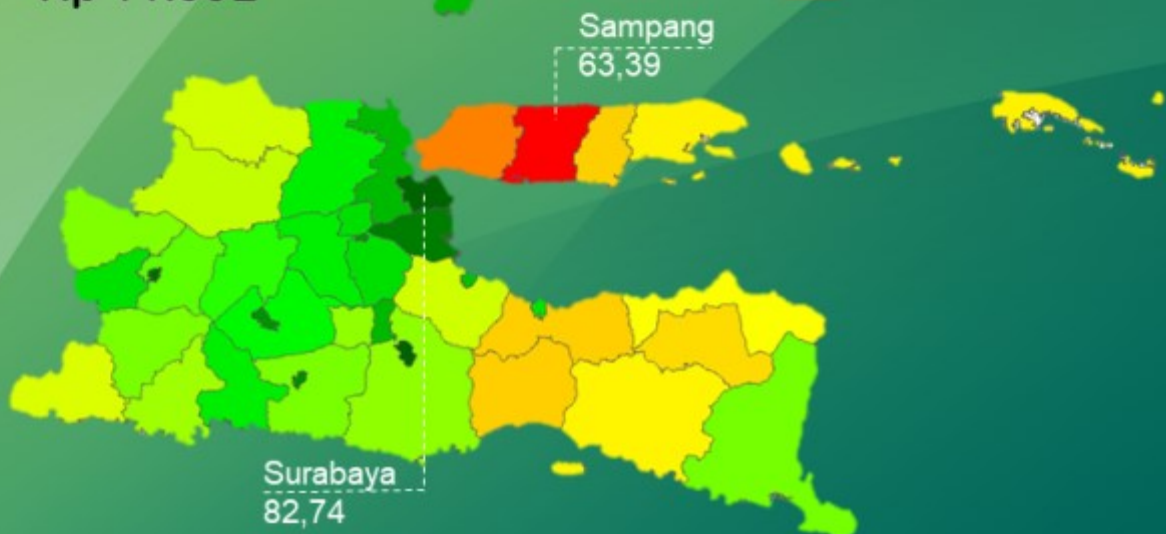
Rata-rata Lama Sekolah:

8,03 tahun

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah):

Rp 11.992

IPM



Pembangunan manusia di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator *outcome* pembangunan, IPM tidak hanya meninjau satu bidang saja, tetapi merupakan komposit bidang sosial dan ekonomi.

4.1. Perkembangan IPM Jawa Timur

Pada tahun 2022, IPM Jawa Timur mencapai 72,75 atau meningkat sebesar 0,61 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 72,14 poin. Dengan kata lain, pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,85 persen. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya pemulihan Jawa Timur pasca puncak Pandemi Covid-19.

Rata-rata kecepatan pertumbuhan IPM Jawa Timur sejak tahun 2016 sampai 2022 adalah 0,77 persen poin per tahun. Pembangunan manusia tahun 2022 memang sudah masuk kategori “tinggi”, perlambatan laju IPM di tahun 2020 agaknya telah pulih yang ditandai dengan meningkatkan seluruh komponen penyusun IPM pada tahun 2022. Sebagai indikator *outcome* jangka panjang, Pandemi Covid-19 tidak memberi dampak negatif terhadap IPM, namun terdeteksi pada pengeluaran riil per kapita per tahun saja.

Pada tahun 2022, jumlah kabupaten/kota yang nilai indikator penyusun IPM-nya berada di bawah IPM Jawa Timur sebanyak 20 kabupaten/kota, sedangkan 18 wilayah lainnya



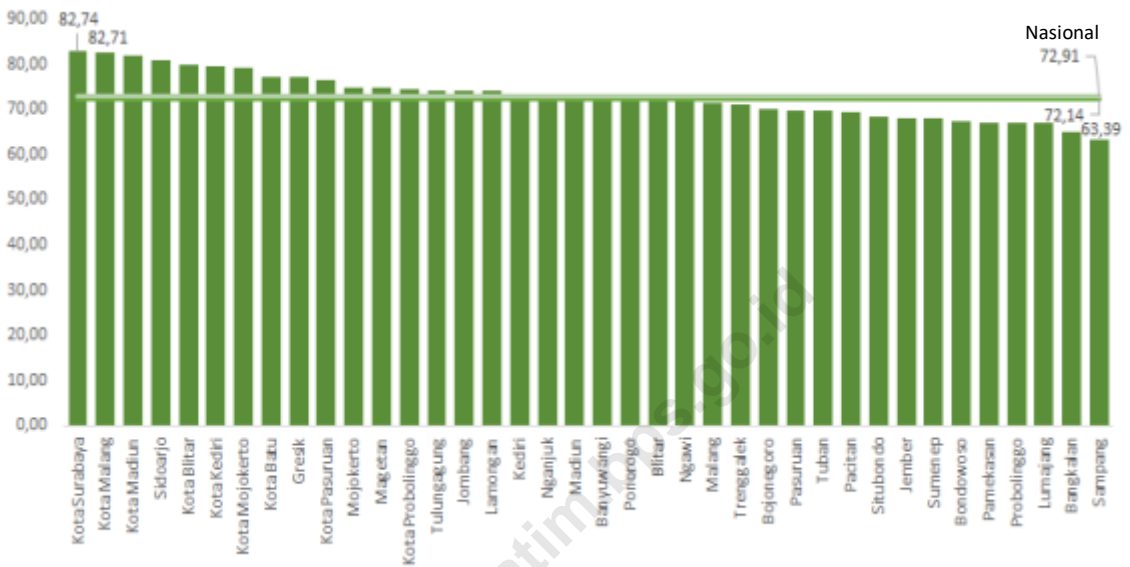
Gambar 4.1 IPM Jawa Timur Tahun 2016-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan manusia di Jawa Timur rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan pesatnya pembangunan di berbagai bidang, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang ditopang dengan SDM yang melimpah membuat Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

4

Pembangunan Manusia di Jawa Timur



Gambar 4.2 Posisi IPM Jawa Timur Terhadap IPM Menurut Provinsi Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

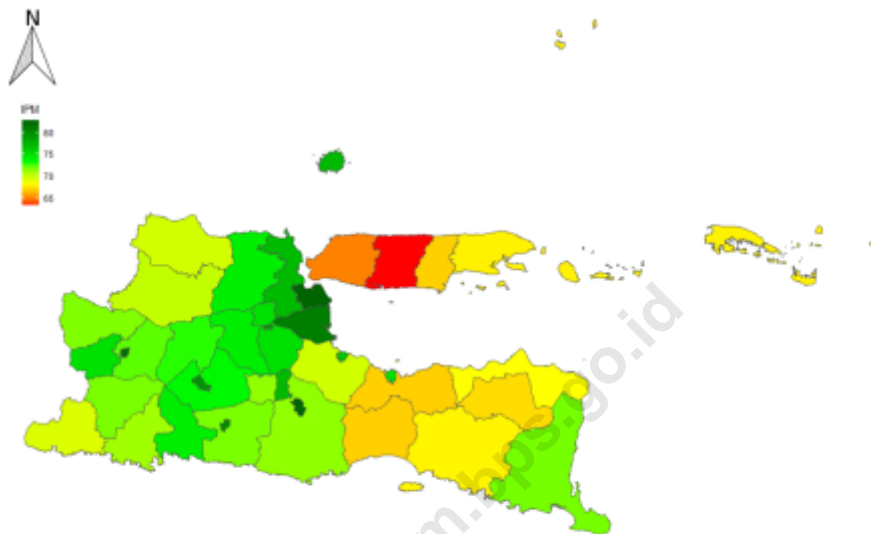
Kabupaten Sampang pada tahun 2017 memiliki IPM yang masuk dalam kategori “rendah”. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Sampang “naik kelas” atau masuk dalam kategori “sedang”. Fakta ini menjadi bukti terus meningkatnya pembangunan manusia di Kabupaten Sampang.

berada di atas IPM Jawa Timur.

Pemerintah provinsi perlu berupaya lebih besar agar capaian masing-masing indikator pembentuk IPM kabupaten/kota meningkat, terutama bagi wilayah dengan IPM di bawah IPM Jawa Timur.

Tidak seperti dua tahun sebelumnya, IPM Jawa Timur tahun 2022 menempati posisi ke-14 setelah Jawa Tengah (72,79) dan Aceh (72,80). Dua tahun sebelumnya (2020), posisi Jawa Timur masih di peringkat 15 setelah Sumatera Utara. Hal menarik lain yang terjadi di 2022 adalah sebanyak 57,89 persen kab/kota di Jawa Timur telah mencapai pembangunan manusia berkategori “tinggi”, atau naik 2,63 persen jika dibandingkan dengan kondisi 2021.

Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai



Gambar 4.3 IPM Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

kabupaten satu-satunya yang “naik kelas” pada tahun 2022. Jika sebelumnya hanya berstatus IPM “Sedang”, pada tahun 2022 menjadi “Tinggi”. Peningkatan kelas IPM ini mengindikasikan bahwa dampak pembangunan manusia yang dirasakan masyarakat Bojonegoro semakin baik.

Hingga 2022, Surabaya tercatat sebagai wilayah dengan IPM tertinggi, yaitu sebesar 82,74 diikuti oleh Kota Malang dengan IPM sebesar 82,71. Kabupaten Sampang meskipun sudah naik kelas mampu bertahan pada status IPM “sedang” di tahun 2022, namun IPM-nya masih menempati posisi terendah (63,39) sehingga masih menjadi catatan utama di balik peningkatan IPM Jawa Timur secara umum.

Sebagian besar IPM rendah di Jawa Timur berada di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura.

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih, penggunaan air yang higienis serta fasilitas MCK yang memadai diharapkan menunjang kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

4

Pembangunan Manusia di Jawa Timur



Gambar 4.4 Aktivitas Jual-Beli Sayuran

Sumber: wawanwawa.blogspot.com

Pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif. Satu-satunya wilayah Jawa Timur yang “naik kelas” adalah Kabupaten Bojonegoro. Bila pada tahun 2021 masih berkategori IPM “Sedang”, di tahun 2022 menjadi “Tinggi”.

Faktor budaya diduga kuat masih menjadi penyebab utama rendahnya IPM di wilayah tersebut. Di wilayah ini masih dijumpai rumah tangga yang belum mempunyai toilet sendiri yang menjadi elemen kelayakan fasilitas perumahan layak, budaya pernikahan dini, serta taraf pendidikan yang rendah.

Pola konsumsi rumah tangga juga menjadi penyebab rendahnya IPM di wilayah Tapal Kuda dan Madura. Tidak sedikit rumah tangga yang pola konsumsi makan yang belum mencerminkan pendapatannya. Kebiasaan menabung untuk keperluan lain juga masih dianggap pengeluaran utama, seperti berangkat haji.

Kondisi itu memberikan kesan bahwa daya beli masyarakat di wilayah Tapal Kuda dan Madura relatif rendah. Berbeda dengan daerah yang mempunyai IPM bagus, pola konsumsi rumah tangga lebih terkontrol dan sesuai dengan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

4.2. Pertumbuhan IPM

Percepatan kualitas pembangunan manusia tidak lagi diukur dari indikator reduksi *shortfall* per tahun, tetapi dilihat berdasarkan pertumbuhan IPM antar waktu. Semakin besar angka pertumbuhan IPM suatu daerah dapat dimaknai semakin cepat pencapaian pembangunan manusia di daerah tersebut.

IPM Jawa Timur pada tahun 2022 yang sebesar 72,75, atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (72,14) atau tumbuh sebesar 0,85 persen. Pertumbuhan tahun 2022 terlihat meningkat dibanding pertumbuhan 2021 yang

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,74	70,8	70,97	71,18	71,3	71,38	71,74
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,09	13,1	13,16	13,19	13,36	13,37
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,23	7,34	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03
Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	10.715	10.973	11.380	11.739	11.601	11.707	11.992
IPM		69,74	70,27	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75
Pertumbuhan IPM	Persen	1,15	0,75	0,72	1,02	0,30	0,60	0,85

Gambar 4.5 Perkembangan Komponen IPM Jawa Timur Tahun 2016-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

sebesar 0,60 persen. Pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif. Dampak positif pembangunan itu membawa Kabupaten Bojonegoro “naik kelas” dari IPM berkategori “Sedang” di tahun 2021 menjadi IPM berkategori “Tinggi” pada tahun 2022. Capaian ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah yang terus menggulirkan sejumlah program bantalan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat terkendali dan ekonomi tetap tumbuh pasca pandemi Covid-19.

Konteks ekonomi yang tumbuh tersebut dimaksudkan bukan hanya dinikmati oleh sebagian penduduk yang berpendapatan menengah ke atas saja, melainkan dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inklusif).

Meninjau kembali *series* data IPM Jawa Timur mulai 2016 hingga 2022, terlihat adanya pertumbuhan yang dinamis di antara komponen penyusunnya. Kecepatan Umur Harapan Hidup (UHH) cenderung berfluktuatif, dari yang awalnya 70,74 tahun (2016), meningkat tipis di tahun 2017 sebesar 0,08 persen. Kemudian kembali meningkat

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti pertumbuhan ekonomi tersebut mengusung pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, perluasan akses hasil pembangunan, serta kesempatan kerja yang luas dan layak

4

Pembangunan Manusia di Jawa Timur

Bantuan ekonomi melalui program bantuan sosial (Bansos) selama pandemi Covid-19 secara efektif mampu melindungi daya beli masyarakat Jawa Timur sehingga terhindar dari krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kontinuitas program tersebut mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi Jawa Timur

di tahun 2018 sebesar 0,24 persen dan naik sebesar 0,50 persen pada tahun 2022, selama tujuh tahun pertumbuhan UHH tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 0,30 persen.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) juga demikian dinamis. Pertumbuhan tertinggi indikator ini terjadi pada tahun 2016, yakni mencapai 2,52 persen. Sedangkan capaian pertumbuhan tertinggi untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,71 persen.

Kendati demikian, pada tahun 2020, indikator pengeluaran per kapita sempat mengalami penurunan sepanjang perjalanan IPM Jawa Timur sejak tahun 2016 akibat adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sejumlah sektor ekonomi dan sosial lumpuh. Bila pada tahun 2019 pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp. 11,74 Juta, pada tahun 2020 turun 1,18 persen menjadi Rp. 11,60 juta.

Kendati tahun 2020 penuh tantangan, ekonomi Jawa Timur terus mengalami pemulihan terutama di tahun 2022. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2021 (-2,66 persen) lebih rendah dibandingkan Triwulan IV-2020 (-0,94 persen). Pemulihan ekonomi ini terus berlanjut dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,24 persen. Bantuan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 melalui program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) telah menunjukkan keefektifannya dalam melindungi ekonomi masyarakat, terutama Jawa Timur dari ketidakpastian ekonomi.

Kesehatan

5

5.1. Definisi dan Manfaat Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup menjadi indikator untuk mengukur pembangunan dalam bidang kesehatan sebagai representasi komponen umur panjang dan hidup sehat. Idealnya seseorang yang memiliki umur panjang dan hidup sehat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini dapat menunjukkan sejauh mana pembangunan yang telah diselenggarakan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik.

Kesehatan menjadi aspek penting dalam pembangunan, karena kesehatan menjadi modal penting bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga menjaga kesehatan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap individu.

Sehat menurut Kemenkes RI memiliki definisi sendiri mengenai sehat dan bugar. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat diperlukan agar setiap individu merasa nyaman, aman dan bebas dalam melakukan apa yang diinginkannya dengan leluasa. Demi menjaga kesehatan bersama maka



Gambar 5.1 Pekan Imunisasi Nasional

Sumber: sehati11022012.blogspot.com

“ Sinergi antara pembangunan manusia dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi pembangunan nasional. Demikian halnya pembangunan dalam bidang kesehatan, sehingga menjaga kesehatan dalam upaya pembangunan bidang kesehatan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap individu “

5

Kesehatan



Gambar 5.2 Pendidikan Mencuci Tangan

Sumber: ind-unp10b.blogspot.com

prosedur-prosedur khususpun diberlakukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Umur Harapan Hidup dapat menggambarkan kualitas atau derajat kesehatan suatu masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya terfokus pada upaya pengobatan atau upaya kuratif dan rehabilitasi saja. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan upaya promotif dan preventif dan upaya tersebut menjadi salah satu pilar utama program Indonesia Sehat.

Sosialisasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan individu dan masyarakat terus diupayakan untuk peningkatan derajat kesehatan. Pengenalan berbagai macam jenis penyakit yang tidak menular maupun menular, gejala-gejala yang timbul, cara penularan, penanganan dan pengobatan cara-cara pencegahan, serta dilakukannya pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif dan preventif diharapkan dapat mengurangi resiko penularan penyakit (prevalensi penyakit) dan mampu menurunkan tingkat kematian akibat penyakit, khususnya penyakit berat dan penyakit menular.

Kesehatan 5

5.2. Tren Usia Harapan Hidup

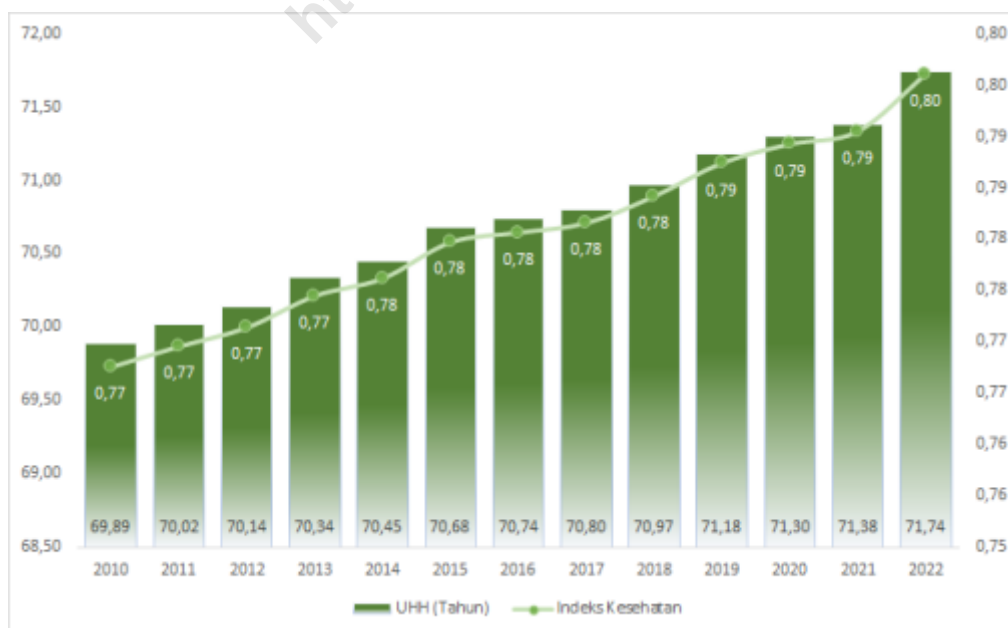
Peningkatan UHH penduduk di Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan derajat kesehatan penduduk Jawa Timur. Hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan juga peran aktif penduduk Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat.

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Jawa Timur pada tahun 2022 adalah 71,74 tahun, artinya rata-rata harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2022 dapat mencapai umur 71,74 tahun. Apabila dibandingkan dengan rata-rata harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2010, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki



Gambar 5.3 Imunisasi Rubella

Sumber: kuliah-ikm.blogspot.com

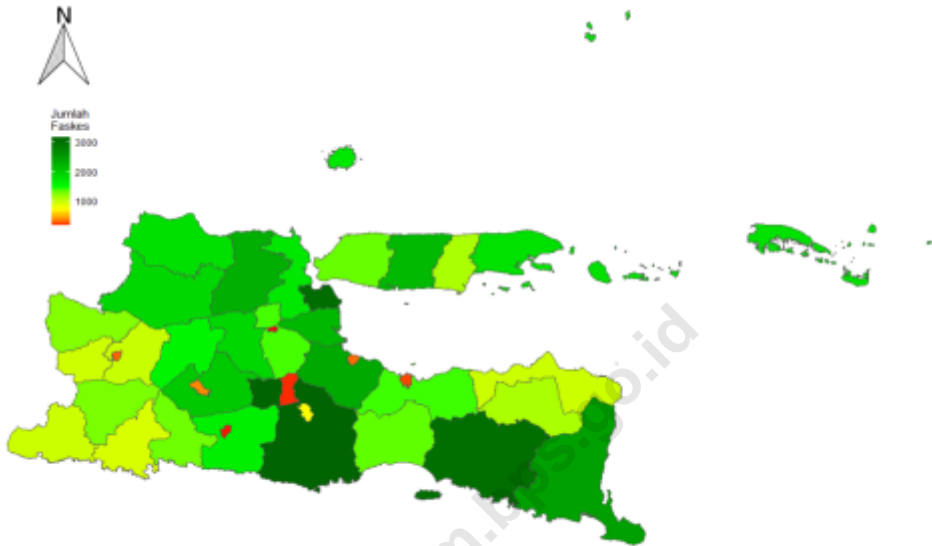


Gambar 5.4 Perkembangan Umur Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Jawa Timur Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

5

Kesehatan



Gambar 5.5 Peta Sebaran Jumlah Fasilitas Kesehatan di Jawa Timur 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Tiga indikator status kesehatan masyarakat diukur dengan melihat mortalitas yaitu tingkat kematian penduduk, kemudian melihat status gizi penduduk serta melihat sejauh mana tingkat morbiditas atau keluhan penyakit yang diderita oleh penduduk.

kenaikan harapan hidup yang cukup signifikan yaitu 1,85 tahun lebih lama. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di Jawa Timur memberikan dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan penduduknya. Hal tersebut ditunjukkan juga oleh peningkatan indeks kesehatan penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun.

Umur Harapan Hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi, apabila angka kematian bayi pada suatu wilayah tinggi maka umur harapan hidup penduduk di wilayah tersebut akan rendah dan sebaliknya, jika angka kematian di suatu wilayah rendah maka umur harapan hidup pada wilayah tersebut akan tinggi. Itu sebabnya salah satu program prioritas pembangunan dalam bidang kesehatan adalah menekan angka kematian bayi.

Kesehatan

5

5.3. Aspek-aspek Kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional merupakan 2 (dua) pilar lainnya program Indonesia Sehat saat ini disamping penguatan paradigma sehat promotif dan preventif. Sejalan dengan program pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, maka pemerataan ketersediaan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Jawa Timur yang meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan terus dilakukan dengan dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Di samping itu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimaksudkan untuk memudahkan penduduk mengakses fasilitas kesehatan dan mengurangi keterbatasan/kendala khususnya dalam hal finansial. Berikut adalah gambaran tentang sebaran fasilitas kesehatan di kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sebagaimana tertera pada gambar 5.5, ketersediaan fasilitas kesehatan masih terpusat pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Sementara untuk beberapa wilayah di kawasan barat Jawa Timur (wilayah Matraman) yaitu Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Magetan dan Kota Madiun serta beberapa wilayah di kawasan timur (wilayah Pandalungan) yaitu Kabupaten Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang dan Kab. Probolinggo tidak memiliki banyak fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang



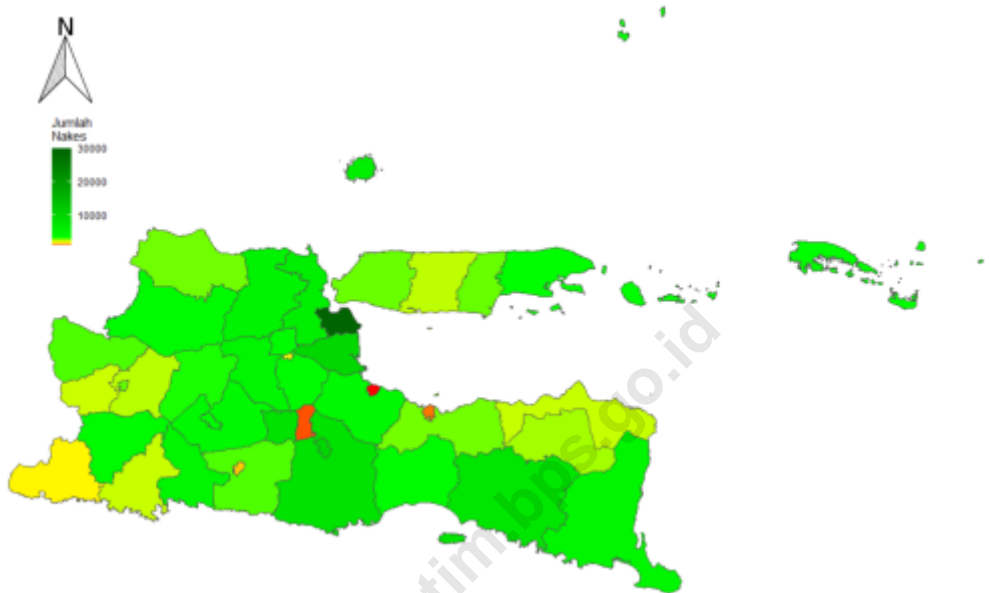
Gambar 5.6 Pemukiman Kumuh

Sumber: wikiwdya.blogspot.com

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan terus diupayakan untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB). Seiring dengan target SDG's 3.2, yakni menurunkan AKB hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup

5

Kesehatan



Gambar 5.7 Peta Sebaran Jumlah Fasilitas Kesehatan di Jawa Timur 2022

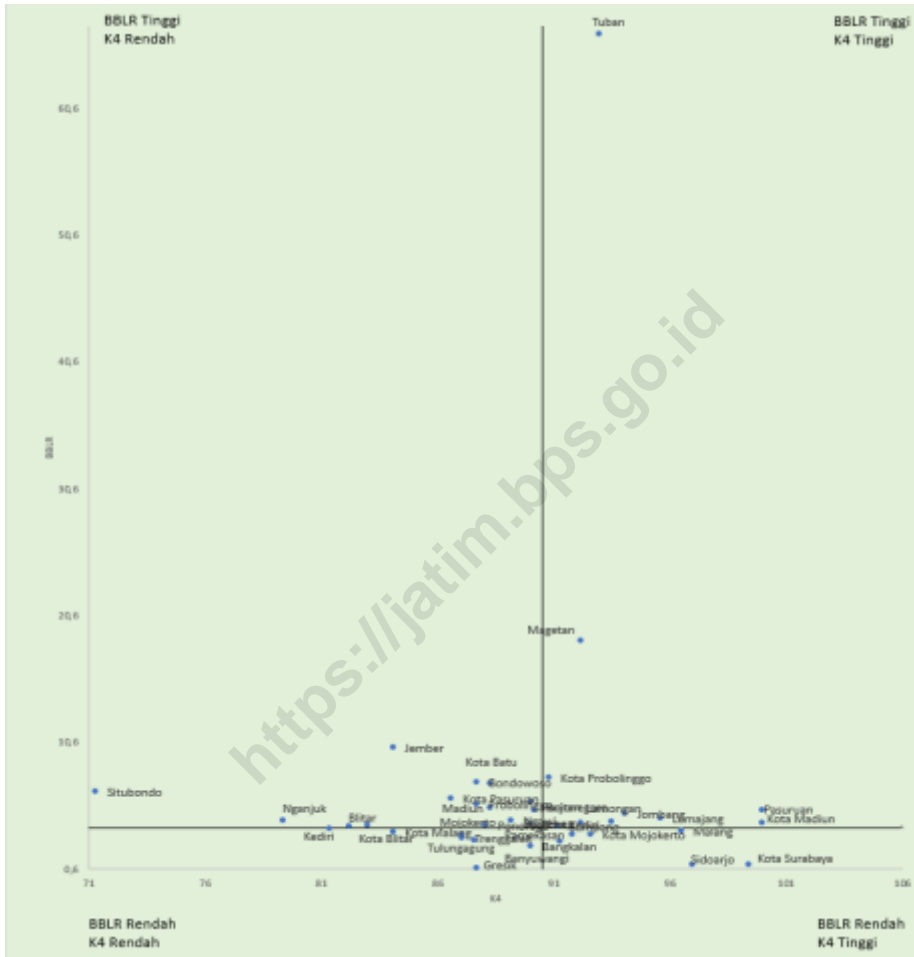
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Infrakstruktur penunjang kesehatan yang disertai dengan kualitas pelayanan kesehatan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan IPM melalui komponen Umur Harapan Hidup (UHH) diharapkan tercapai secara optimal dan pada akhirnya mampu menjadi sumber peningkatan dari IPM suatu wilayah

dimaksud, meliputi keberadaan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan Polindes.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pendidikan tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan penduduk. Tenaga kesehatan yang profesional dapat meningkatkan kesehatan penduduk (sumber daya manusia) dengan memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif sekaligus juga dapat mencerdaskan SDM dengan pelayanan promotif dan preventif dalam bentuk

Kesehatan 5



Gambar 5.8 Sebaran Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan K4 dan BBLR menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Profil Kesehatan Jawa Timur 2021

edukasi, sosialisasi, bagaimana menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Banyak orang yang ingin sehat akan tetapi kurang memperhatikan dan kurang menjaga kesehatannya. Paradigma sehat dengan penguatan upaya promotif dan preventif sejalan dengan semboyan kesehatan “ Lebih baik mencegah daripada mengobati” haruslah

5

Kesehatan

menjadi semboyan hidup masyarakat saat ini. Menerapkan pola hidup sehat dengan memperhatikan asupan gizi yang seimbang dan melakukan aktifitas fisik yang cukup diperlukan untuk menjaga kesehatan. Sebaran ketersediaan tenaga kesehatan di kabupaten/kota se-Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 5.7.

Sama halnya dengan penyebaran fasilitas kesehatan di kabupaten/kota se-Jawa Timur, ketersediaan tenaga kesehatan yang meliputi keberadaan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan, masih terpusat di beberapa wilayah saja seperti Kota Surabaya, Kab. Malang/Kota Malang, Kota Blitar, Kab. Jember dan beberapa wilayah di bagian barat Jawa Timur seperti Kabupaten/kota Kediri, Kab. Tulungagung. Jumlah tenaga kesehatan di sebagian besar wilayah di Jawa Timur terbilang masih cukup rendah. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan tenaga kesehatan juga fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah untuk diakses oleh penduduk.

Pergeseran paradigma kesehatan yang konservatif menjadi paradigma sehat yang baru dimana sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat. Tanpa mengabaikan upaya kuratif untuk pengobatan masyarakat yang sakit, mengutamakan upaya promotif dan preventif dapat memberikan masukan dalam penyusunan program-program pembangunan yang mengarah pada pengembangan sumber daya

Tingkat kesadaran terhadap aspek kesehatan pada waktu mampu meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat. Namun, infrastruktur yang lengkap dan jasa kesehatan yang mumpuni saja belumlah cukup. Diperlukan pula jaminan pada aspek aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dan jasa kesehatan. Akses yang mudah dijangkau sangat bermanfaat dalam situasi darurat sehingga mengurangi peluang kematian di tengah perjalanan.

Kesehatan

5

manusia. Pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan.

Pembentukan individu yang berkualitas dimulai dengan pembentukan kondisi fisik yang sehat. Pemenuhan gizi untuk Ibu Hamil dan bayi yang dikandungnya menjadi program prioritas pembangunan kesehatan. Pemeriksaan Ibu Hamil secara teratur selama periode kehamilan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi. Sehingga dengan demikian kematian bayi dan kematian ibu dapat dihindari.

Kematian bayi erat kaitannya dengan perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH). Jika tingkat kematian bayi tinggi di suatu wilayah maka UHH, atau harapan seorang bayi akan bertahan hidup pada periode waktu yang panjang/lama di wilayah tersebut akan rendah. Kesehatan Ibu dan Anak menjadi salah satu indikator utama penanda kesehatan keluarga (Kemenkes, 2017). Program pembinaan gizi masyarakat menjadi alat pengungkit peningkatan kesehatan ibu dan anak. Beberapa program tersebut diantaranya adalah penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil; pemberian vitamin A pada anak dan vitamin penambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pencegahan pernikahan dini dan kehalalan pada remaja, pelayanan antenatal care (ANC), pemberian ASI eksklusif, dll.

Gambar 5.8 di atas menunjukkan bahwa persentase kelahiran bayi dengan BBLR (dibawah 2,5 kg) yang tinggi dengan persentase

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lengkong, Fima, dan Jimmy (2020), Berat badan saat bayi lahir, pemeriksaan ANC, status pekerjaan ibu, dan biaya kesehatan berpengaruh signifikan statistik terhadap kematian bayi di Indonesia.

5

Kesehatan

Hasil penelitian Indrasari (2012) memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu berisiko, paritas, kejadian komplikasi kehamilan, jarak kehamilan, penyakit yang diderita ibu, serta perilaku ibu dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

kunjungan Ibu hamil pada masa kehamilannya (trimester ke-3 hingga saat kelahiran) yang juga rendah terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Sementara persentase kelahiran bayi dengan BBLR yang rendah dengan persentase kunjungan Ibu hamil pada masa kehamilannya (trimester ke-3 hingga saat kelahiran) yang tinggi lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah besar seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo dan Kab. Malang. Pada wilayah-wilayah tersebut kesediaan fasilitas pelayanan kesehatan memang cukup banyak dan mudah untuk diakses. Kesadaran individu, dalam hal ini adalah ibu hamil pada wilayah tersebut juga cukup baik untuk melakukan pemeriksaan kehamilan hingga kunjungan ke-4. Dengan melakukan pemeriksaan kehamilan maka kesehatan ibu dan janin akan lebih terpantau. Sehingga kasus BBLR yang terjadi di wilayah ini menjadi rendah.

Kabupaten/kota yang memiliki persentase BBLR di atas 3 persen banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur, yakni mencapai 81,58 persen. Artinya penyelenggaraan program kesehatan khususnya kesehatan bayi dan balita masih perlu dioptimalkan kembali. Status gizi balita menjadi sangat penting dalam pembentukan generasi bangsa yang berkualitas. Bayi sehat jasmani dan rohaninya akan menjadi sumber daya manusia yang potensial, yang memiliki umur harapan hidup yang lebih lama sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Tentunya hal ini pada akhirnya dapat mendorong indeks pembangunan manusia men-

Pendidikan

6

Pendidikan atau pengetahuan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Indikator-indikator sederhana yang meliputi tingkat pendidikan rata-rata penduduk dan harapan lama sekolah merupakan determinan penting IPM. Meski sekilas nampak sederhana, capaian indikator sederhana tersebut berimplikasi dalam hal kesiapan dan kapasitas manusia untuk berperan tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi subyek dan *ultimate beneficiary* pembangunan itu sendiri.

Berbagai permasalahan yang melingkupi pendidikan di Jawa Timur saat ini adalah perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan. Desakan untuk menjawab tantangan permasalahan ini makin dirasakan setelah Indonesia mengikatkan diri melalui komitmen untuk mencapai sasaran Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu menyelesaikan pendidikan dasar dengan mampu membaca, menulis dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

Pada bagian ini akan diulas mengenai status pembangunan pendidikan Jawa Timur berdasarkan data, indikator, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan IPM. Namun, analisis akan



Gambar 6.1 Foto Anak Sekolah Dasar

Sumber: universe roboflow.com

Pada dasarnya, aspek pendidikan menjadi aspek utama sebagai pembentuk IPM. Sebab, pendidikan yang tinggi dan berkualitas akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan memberi peluang besar untuk meningkatkan kemampuan ekonominya.

6

Pendidikan

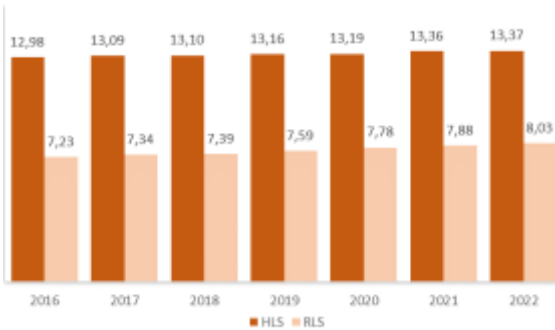
disajikan lebih dari sekadar menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rata-rata lama bersekolah, harapan lama sekolah, dan lainnya sampai dengan sarana dan tenaga pendidikan.

Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya.

6.1. Indikator Pendidikan

Taraf pendidikan penduduk diukur dengan berbagai pendekatan. Cara yang cukup sederhana adalah dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama tahun bersekolah penduduk. Cara yang lebih rinci adalah dengan melakukan disagregasi dan mengelompokkan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikannya.

Harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama tahun bersekolah (*mean years of schooling*) memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum.

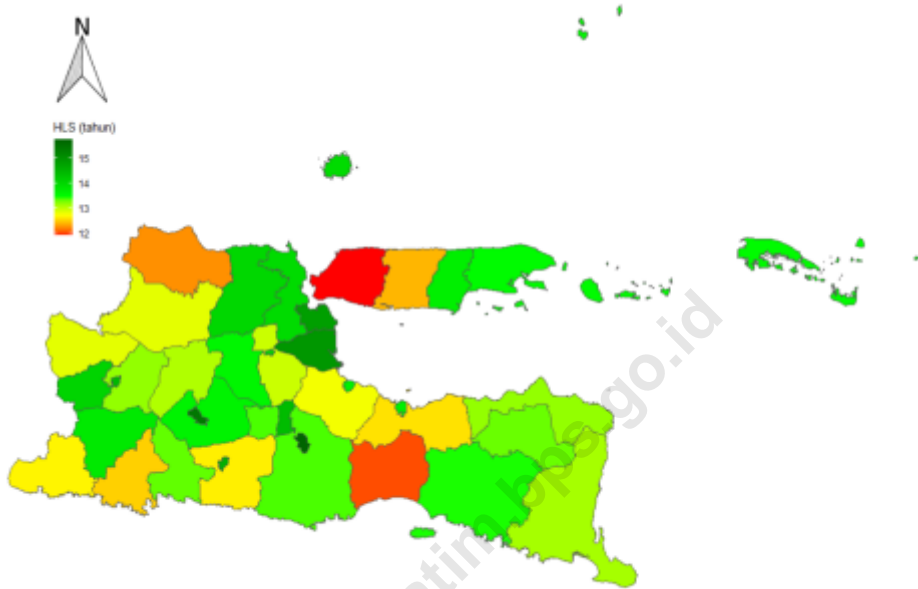


Gambar 6.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur Tahun 2016-2022

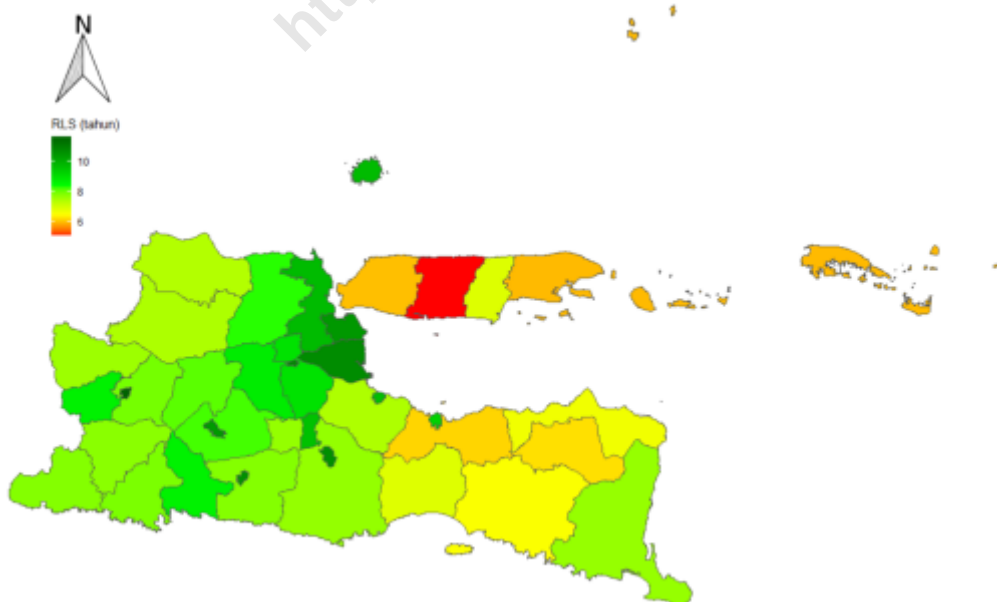
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang

Pendidikan

6



Gambar 6.3 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Gambar 6.4 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

6

Pendidikan

Indikator pendidikan Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,36 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,37 tahun pada tahun 2022. Capaian indikator harapan lama sekolah semakin baik dan masih di atas rata-rata nasional, meskipun pertumbuhannya melambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa di masa yang akan datang, penduduk Jawa Timur usia 7 tahun ke atas berpeluang untuk bersekolah hingga lulus SMA atau selama 13 tahun lebih. Tren perbaikan indikator Pendidikan juga terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas. Angka RLS Jawa Timur meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, RLS Jawa Timur mencapai 8,03 tahun, artinya rata-rata penduduk Jawa Timur bersekolah hingga kelas 2 SMP. Angka ini menunjukkan masih belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan lama oleh pemerintah. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk ini sudah selayaknya perlu ditingkatkan dengan menambahkan program-program pendidikan seperti beasiswa pendidikan dan bantuan untuk siswa dengan keluarga tidak mampu agar bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi.

Melihat perbandingan indikator pendidikan antar kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2022, secara umum Kota Madiun memiliki kualitas pembangunan di bidang pendidikan paling baik. RLS Kota Madiun sebesar 11,67 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Madiun bersekolah hingga kelas 2 SMU.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun adalah RLS tertinggi di Jawa Timur, yakni sebesar 11,67 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Kota Madiun telah mengenyam pendidikan jenjang sampai jenjang kelas 2 SMU.

Aspek pendidikan yang tinggi tentu mampu membangun budaya masyarakat yang sehat sehingga pada saat yang sama memberikan pengaruh positif terhadap Umur Harapan Hidup.

Tidak hanya itu, kondisi masyarakat yang rata-rata berpendidikan tinggi akan meningkatkan peluang kesempatan kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendidikan 6



Gambar 6.5 Anak-anak berangkat ke sekolah

Sumber: www.zyaverani.com

Tenaga kerja di Jawa Timur masih didominasi oleh penduduk berpendidikan SD ke bawah. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi dicapai oleh Kota Malang yang sebesar 15,76, sedangkan HLS terendah adalah Kabupaten Bangkalan (11,91 tahun). HLS Kabupaten Bangkalan terlihat naik sebesar 0,18 tahun dibanding tahun 2021 (11,73). Lambatnya peningkatan RLS tantangan pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan bagi penduduk yang telah berumur 25 tahun ke atas.

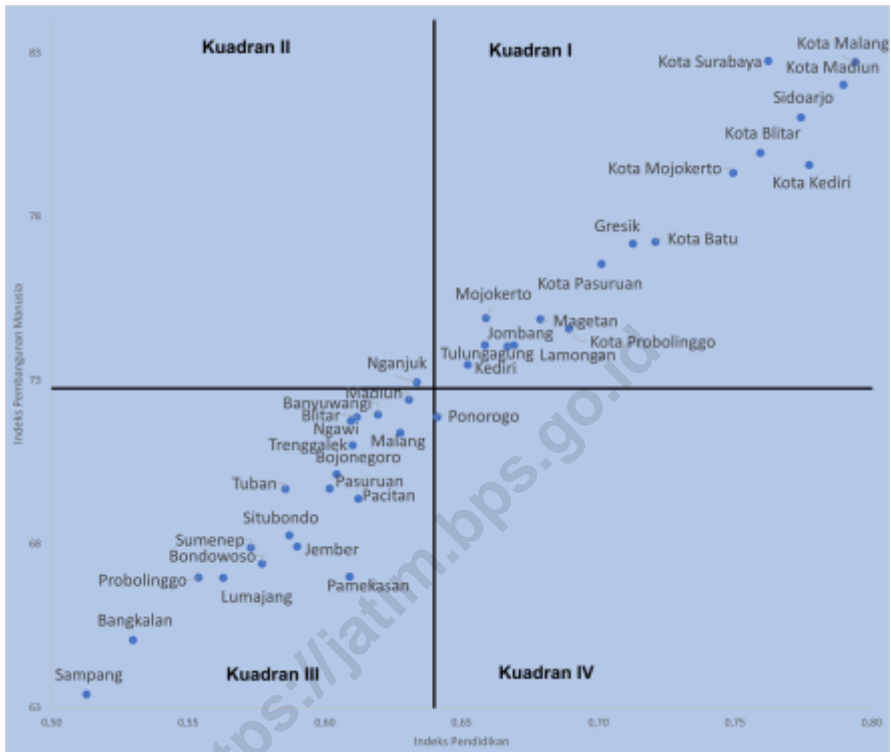
Sedangkan posisi RLS terendah ditempati oleh Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang yang masing-masing nilai 5,93 tahun dan 5,06 tahun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Sumenep dan Sampang tidak sampai menamatkan jenjang pendidikan kelas 6 SD.

Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep dan Sampang masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur pada capaian pendidikan. Selain disebabkan ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga adanya kemungkinan penduduk berpendidikan yang merantau ke wilayah lain.

Pengelompokan penduduk menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Jawa Timur belum begitu menggembirakan. Pada Agustus 2022, persentase penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi angkatan kerja di Jawa Timur, yakni sebesar 44,59 persen. Adapun penduduk bekerja yang berpendidikan SMP sederajat sebesar 18,25 persen, SMA sederajat sebesar 17,72 persen, SMK sebesar 27,80 persen, dan perguruan tinggi hanya sebesar 9,89 persen saja.

6

Pendidikan



Gambar 6.6 IPM dan Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

Dari data ini menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan suatu wilayah memengaruhi kualitas angkatan kerja. Kualitas Angkatan kerja yang rendah akan berdampak pada menurunkan produktivitas. Melihat pada kondisi SDM saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu fokus dan mengunggulkan sektor pertanian karena sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dari segala jenjang pendidikan.

Namun demikian, untuk lebih mendukung perkembangan sektor pertanian ke arah yang lebih maju dan modern, pelatihan dan penyuluhan akan sangat diperlukan sejalan dengan meningkatnya tantangan yang muncul seiring kemajuan sektor pertanian, seperti modernisasi pertanian dan agrobisnis.

Program pengembangan dan revitalisasi pendidikan diharapkan mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Jawa Timur sehingga memperkecil disparitas kualitas pendidikan yang secara langsung berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Program bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi setiap siswa yang secara kontinu diberikan oleh pemerintah diharapkan akan mampu mendongkrak Harapan Lama Sekolah (HLS). Program beasiswa juga dapat diberikan kepada anak-anak petani dan nelayan yang kurang mampu secara ekonomi sehingga angka *Drop Out* (DO) juga terus berkurang sehingga pada waktunya akan meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Berbagai bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa juga diupayakan terlebih kepada keluarga miskin. Dari berbagai program pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Timur, diharapkan dapat menjadikan mutu SDM lebih berkualitas dan membaik. Berbagai persoalan sosial akan semakin terurai dengan mutu pendidikan penduduk yang semakin baik.

Indeks pendidikan Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 0,626. Indeks ini kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,634 atau meningkat sebesar 0,008. Sedangkan pada tahun 2022, indeks pendidikan Jawa Timur kembali meningkat menjadi 0,639 atau naik sebesar 0,005. Tidak hanya dalam tiga tahun terakhir, angka indeks pendidikan Jawa Timur terus meningkat setiap tahun sejak 2015 dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 0,012. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemerintah Jawa Timur sangat serius dalam penanganan masalah pendidikan, meskipun dengan catatan, pada tahun 2020, terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Sederajat masing-masing sebesar 0,02 persen dan 1,21 persen.

Terdapat 17 kabupaten/kota yang mempunyai indeks pendidikan dan IPM di atas Jawa Timur (Kuadran I). Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur mempunyai indeks pendidikan dan IPM di bawah Jawa Timur (Kuadran III), 1 kabupaten dengan indeks pendidikan di atas Jawa Timur dan IPM di bawah Jawa Timur (Kuadran IV), serta 1 kabupaten dengan IPM di atas Jawa Timur dan indeks pendidikan di bawah Jawa Timur (Kuadran II). Sama dengan tahun sebelumnya, Kota Malang tercatat mempunyai indeks pendidikan tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 0,79 sedangkan Sampang (0,51) tercatat mempunyai indeks pendidikan terendah.

6

Pendidikan

6.2. Beberapa Strategi

Pemerintah Jawa Timur menyadari bahwa hanya dengan penduduk berpendidikan tinggi, Jawa Timur akan menjadi daerah yang makmur dan madani. Oleh karena itu, Pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pelayanan pendidikan berupaya meningkatkan program pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah hingga pelosok.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Jawa Timur yaitu program bebas buta huruf untuk anak usia sekolah, dan 0 persen untuk angka *drop out* sekolah. Bagi usia dewasa yang masih buta huruf, diupayakan untuk segera mengikuti paket program belajar atau yang sejenisnya. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kejar paket dan vokasi agar *link* dan *match* dengan kebutuhan lapangan usaha yang tersedia.

Beasiswa dengan sistem zonasi juga agaknya mampu mendongkrak indeks pendidikan menjadi lebih meningkat. Sebab, dengan sistem beasiswa zonasi akan mampu menjaga rata-rata pendidikan yang berhasil dicapai.

Pendidikan yang tinggi mampu memperluas pilihan seseorang untuk memperoleh pekerjaan sekaligus pendapatan yang layak. Dengan demikian, pendidikan yang tinggi relatif erat kaitannya dengan peluang untuk memperoleh kehidupan yang layak baik secara sosial maupun ekonomi

Kehidupan Yang Layak

7

7.1. Indikator Pendekatan

Paradigma baru dalam pembangunan manusia yang dikenalkan oleh UNDP menekankan pada proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), salah satunya adalah mencapai kehidupan layak yang sesuai dengan keinginan. Standar hidup layak tersebut digambarkan melalui tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya tersebut merupakan perantara untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lain-lain.

Dalam konteks inilah, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Namun, seringkali indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali *under estimate* sehingga diperlukan sebuah indikator yang mendekati indikator pendapatan. Di dalam penghitungan IPM, dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Capaian indikator pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan Jawa Timur selama



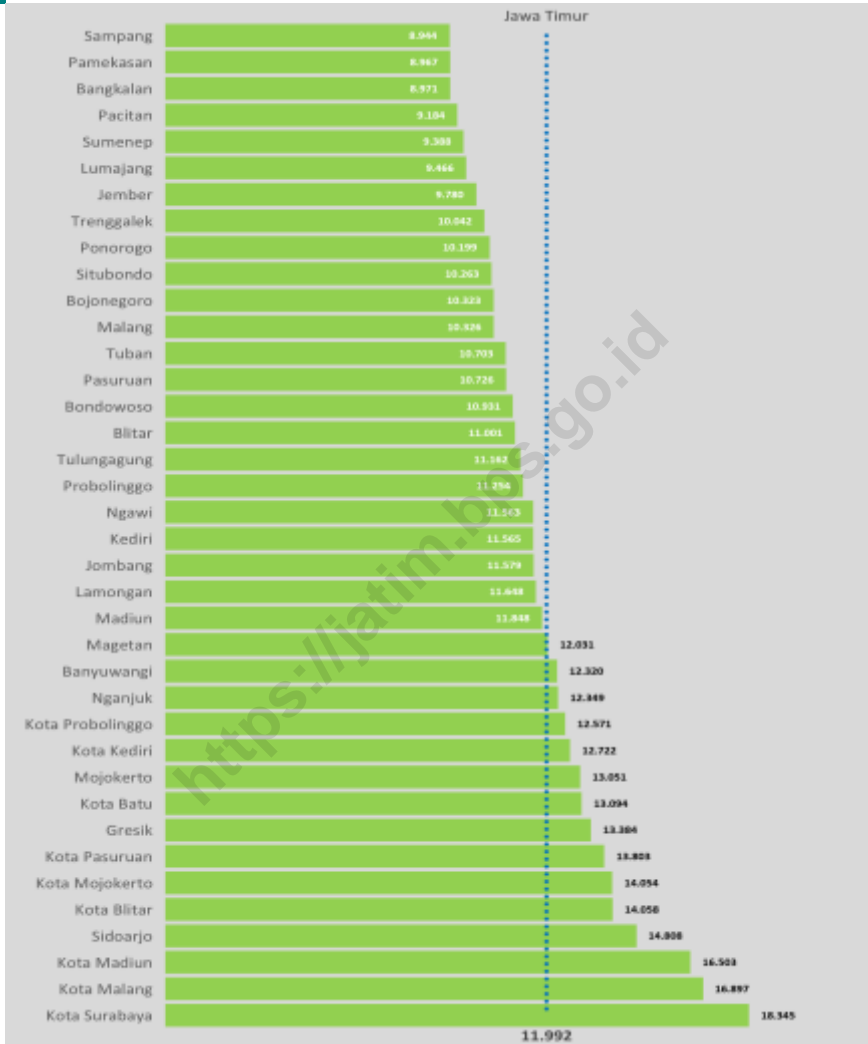
Gambar 7.1 Potret Kesenjangan Pendapatan

Sumber: Detik.com

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama pembangunan di Indonesia dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

7

Kehidupan Yang Layak



Gambar 7.2 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

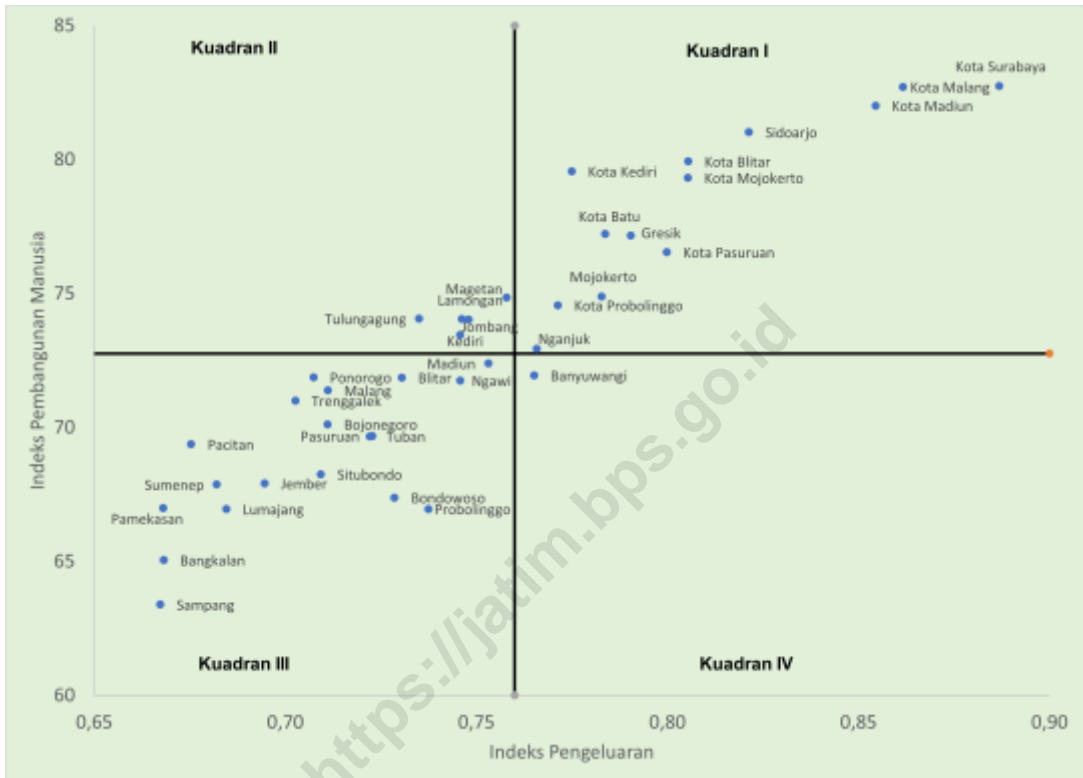
Dimensi standar hidup layak dalam IPM digambarkan melalui indeks pengeluaran riil per kapita disesuaikan.

2016-2022 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2016 nilainya sebesar 10.715 ribu rupiah dan terus meningkat pada tahun berikutnya sehingga mencapai 11.992 ribu rupiah pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan penurunan nilai pengeluaran per kapita per tahun di Jawa Timur

Kehidupan Yang Layak

7



Gambar 7.3 IPM dan Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

sebesar 1,18 persen. Namun, kondisi tersebut mengalami perbaikan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat di tahun berikutnya. Pada tahun 2021, indikator pengeluaran Jawa Timur mencapai 11.707 ribu rupiah, meningkat 0,91 persen dibanding periode sebelumnya. Dan kembali meningkat sebesar 2,43 persen pada tahun 2022 sebesar 11.992 ribu rupiah.

Selanjutnya, capaian indikator pengeluaran Jawa Timur juga menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Pada tahun 2022, indikator pengeluaran per kapita disesuaikan pada tingkat nasional mencapai 11.497 ribu rupiah.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia. Untuk menjamin kualitas pembangunan suatu negara, pembangunan manusia harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

7

Kehidupan Yang Layak

Sebaran kabupaten/kota menurut indikator pengeluaran menunjukkan bahwa Kota Surabaya menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan nilai pengeluaran riil per kapita disesuaikan terbesar dibanding wilayah lainnya. Pada tahun 2022 nilainya sebesar 18.345 ribu rupiah. Selanjutnya, terdapat Kota Malang dan Kota Madiun yang memiliki indikator pengeluaran terbesar berikutnya, masing-masing sebesar 16.897 ribu rupiah dan 16.503 ribu rupiah.

Sementara itu, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan berturut-turut memiliki indikator pengeluaran terkecil di Jawa Timur. Pada tahun 2022, masing-masing wilayah tersebut memiliki nilai sebesar 8.944 ribu rupiah, 8.967 ribu rupiah, dan 8.971 ribu rupiah. Kondisi tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 23 kabupaten/kota yang memiliki indikator pengeluaran riil per kapita disesuaikan di bawah rata-rata Jawa Timur, sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya memiliki indikator pengeluaran di atas rata-rata Jawa Timur.

7.2. Indeks Pengeluaran

Dalam pembentukan IPM, indikator pengeluaran riil per kapita disesuaikan disajikan dalam bentuk indeks pengeluaran. Semakin tinggi nilai indeks pengeluaran menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin baik. Pada tahun 2022, indeks pengeluaran Jawa Timur sebesar 0,76 atau tercatat naik tipis dibanding tahun 2021.

Ketimpangan pendapatan di Jawa Timur masih cukup tinggi, tampak dari variasi pada indikator pengeluaran riil per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Indikator pengeluaran per kapita di Kota Surabaya (tertinggi) bernilai dua kali lipat dari nilai pengeluaran per kapita di Bangkalan (terendah).

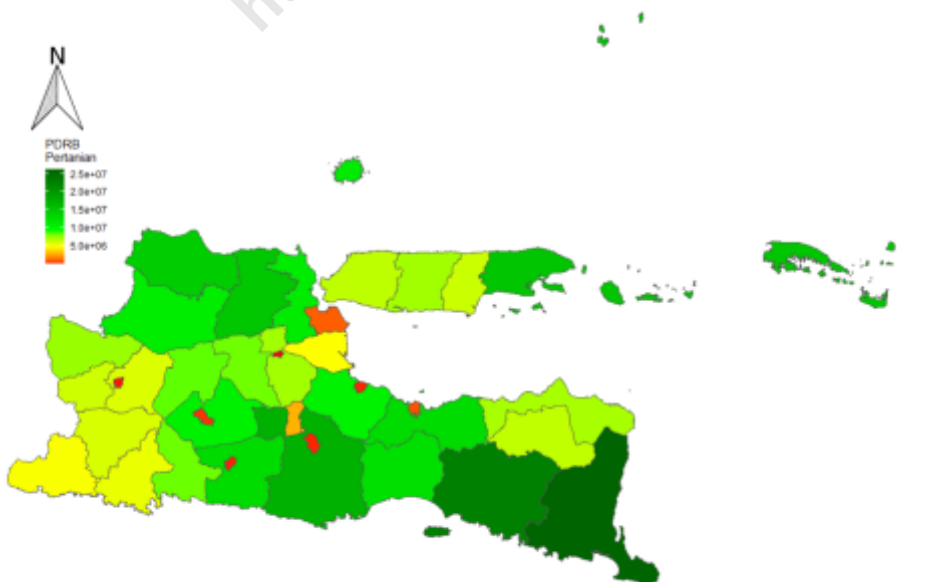
Kehidupan Yang Layak

7

Sektor pertanian vital dalam perekonomian Jawa Timur, menghasilkan produk kebutuhan dasar masyarakat, serta memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam perekonomian.

Sudah saatnya pertanian dikembangkan dengan cara modern.

Gambar 7.3 menunjukkan sebaran kabupaten/kota berdasarkan capaian IPM dan indeks pengeluarannya yang terbagi dalam empat kuadran. Kuadran I merupakan kelompok kabupaten/kota yang mempunyai indeks pengeluaran dan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Timur. Kuadran II terdiri dari kabupaten/kota dengan IPM lebih tinggi dari Jawa Timur dan indeks pengeluaran lebih rendah dari Jawa Timur. Kuadran III terdiri dari kabupaten/kota dengan nilai IPM dan indeks pengeluaran yang lebih rendah dibanding Jawa Timur. Sementara itu, kuadran IV terdiri dari kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dibanding Jawa Timur tetapi indeks pengeluarannya lebih tinggi dibanding Jawa Timur.



Gambar 7.4 Sebaran PDRB Pertanian di Jawa Timur Tahun 2022 (Juta Rupiah)

7

Kehidupan Yang Layak

Terdapat 13 kabupaten/kota yang berada di kuadran I. Semua wilayah perkotaan berada pada kelompok ini, ditambah dengan beberapa wilayah diantaranya Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Nganjuk. Sementara itu, 19 kabupaten/kota berada pada kuadran III, 5 kabupaten/kota di kuadran II, dan 1 kabupaten/kota di kuadran IV.

Banyaknya kabupaten/kota yang berada di kuadran III menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Jawa Timur. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari dimensi hidup layak masih terpusat di wilayah perkotaan dengan tipe perekonomian modern (industri dan jasa). Sementara itu, wilayah berbasis pertanian cenderung memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah.

Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian Jawa Timur, memberikan kontribusi terbesar ke tiga pada nilai tambah Jawa Timur. Sebagai penyedia produk kebutuhan dasar hidup manusia, sektor ini mampu bertahan di masa pandemi. Kendati demikian, terdapat permasalahan yang masih tersisa, di antaranya adalah ketersediaan lahan, sumber daya petani, dan tata niaga produk pertanian.

Salah satu konsep pengembangan sektor pertanian adalah konsep agropolitan yang menekankan pada penerapan pertanian modern dengan konektivitas antar sektor dan daerah yang baik. Wilayah kantong kemiskinan yang umumnya tersebar di wilayah agraris akan sangat tertolong dengan konsep agropolitan karena terjadi konektivitas yang baik dari usaha hulu hingga hilir.

Konektivitas antar wilayah menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan infrastruktur, baik fisik maupun digital, penting dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Indeks Pembangunan Gender

8

Dalam laporan pembangunan manusia tahun 1995 UNDP menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menerapkan empat komponen penting, yakni produktifitas, kesetaraan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan gender, komponen yang patut menjadi perhatian adalah kesetaraan dan pemberdayaan. Bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pembangunan, tanpa melihat gender, disabilitas, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan tempat lahir. Dalam hal pemberdayaan, setiap orang harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan harus berawal dari rakyat, bukan hanya untuk rakyat.

Secara umum, selama ini menjadi pihak yang kesempatan, kapasitas, dan akses sumber dayanya relatif terbatas dibanding laki-laki. Hal ini secara tidak sadar terbentuk oleh ekspektasi di masyarakat dan keberadaan norma-norma sosial. Masyarakat berharap perempuan bisa menjadi pengurus rumah tangga dan anggota keluarga lain sehingga peluang perempuan untuk membuka pintu-pintu kesempatan seakan-akan terbatas. Bank Dunia (2012) mengamati bahwa ketimpangan gender terjadi di berbagai belahan dunia dalam berbagai dimensi kehidupan dan siklus hidup. Kadang hal tersebut merugikan laki-laki, namun sebagian besar merugikan perempuan. Sebagai kesimpulan, ketimpangan gender merupakan akibat dari interaksi di tingkat rumahtangga, pasar, dan institusi.

Istilah gender tidak mengacu atau menggantikan istilah perempuan, tapi menggambarkan laki-laki dan perempuan keduanya (Handayani dan Pardede, 2017). Lebih lanjut, mereka menggarisbawahi bahwa kesetaraan bermakna *equity* (kesamaan) dan *equality* (perlakuan yang adil dan setara)



Gambar 8.1 Industri Cangkul

Sumber: republika.co.id

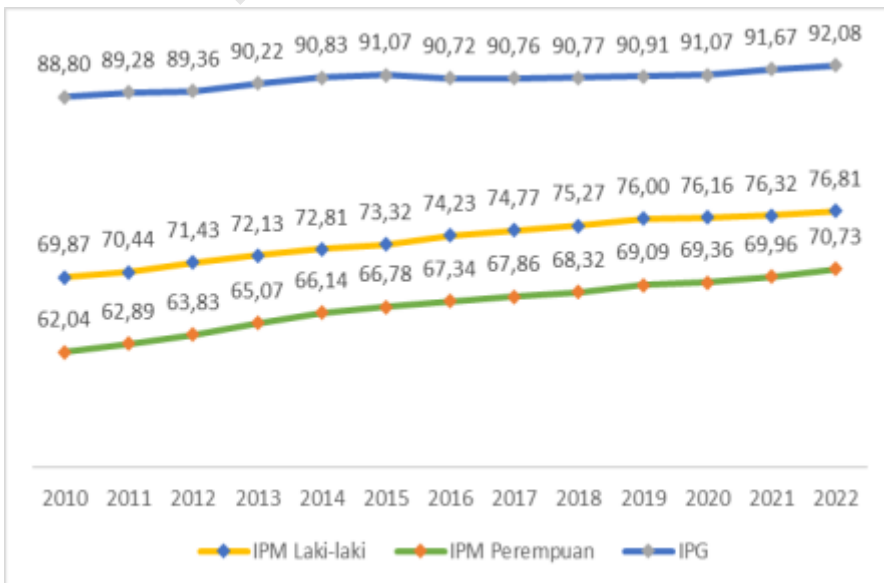
8

Indeks Pembangunan Gender

UNDP sendiri menegaskan bahwa jika pembangunan tidak memperhatikan aspek gender, maka akan sangat berbahaya (*development, if not engendered, is endangered*). Artinya, pembangunan manusia dikatakan berhasil jika potensi setiap individu termanfaatkan secara keseluruhan.

Padahal, keterlibatan perempuan dalam perekonomian berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat jumlahnya yang separuh populasi (Bank Dunia, 2012). Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam perekonomian masih berstatus sebagai pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar. Selain itu, pemberdayaan gender juga akan mempercepat capaian SDGs dan tujuan pembangunan manusia lainnya. Perempuan yang terdidik akan mampu mengontrol fertilitasnya, memelihara kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan; serta mendidik putra-putrinya. Dengan kata lain, mendidik perempuan berarti menyiapkan generasi penerus yang lebih terdidik dan sejahtera.

Salah satu ukuran untuk mengukur perkembangan pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks



Gambar 8.2 IPG Jawa Timur Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Pembangunan Gender

8

Pemberdayaan Gender (IDG). IPM, IPG, dan IDG mempunyai hubungan erat. IPM mengukur capaian peningkatan kapasitas dasar manusia, sementara IPG secara konsep hampir sama dengan IPM, namun telah mempertimbangkan ketimpangan capaian menurut gender. Jika capaian ini turun atau melebar, maka nilai IPG akan terkoreksi.

Dalam satu dekade terakhir, nilai IPG Jawa Timur periode 2010-2022 cenderung mengalami kenaikan dari 88,80 menjadi 92,08. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk membangun perempuan Jawa Timur yang diukur dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli telah menunjukkan hasil. Pada periode tersebut IPM perempuan naik lebih tinggi dibanding IPM laki-laki, masing-masing sebesar 8,69 poin dan 6,94 poin. Diharapkan, perempuan Jawa Timur menjadi semakin terbuka peluang dan kesempatannya untuk menjadi apa saja yang bermakna dalam hidupnya.

Meningkatnya nilai IPG Jawa Timur membuat posisi pembangunan gender Jawa Timur terhadap nasional mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 Jawa Timur masih menempati urutan 17 diantara provinsi lain di Indonesia, kemudian peringkat ini naik perlahan satu dekade sesudahnya menjadi urutan 15 pada tahun 2022.

Meningkatnya IPM perempuan yang lebih tinggi daripada IPM laki-laki membuat jarak (*gap*) antara IPM laki-laki dan perempuan menjadi semakin sempit sebagaimana terlihat dalam grafik. Pada tahun 2010 jarak IPM laki-laki dan



Gambar 8.3 Pekerja wanita

Sumber: news.unair.ac.id

Keterlibatan perempuan mempunyai nilai intrinsik dan instrumental. Bernilai intrinsik berarti bisa hidup bebas sesuai pilihan dan terpenuhi kebutuhan dasar tanpa melihat atribut gender. Sedangkan nilai instrumental bermakna kesetaraan gender akan mendorong efisiensi ekonomi dan output pembangunan lainnya.

8

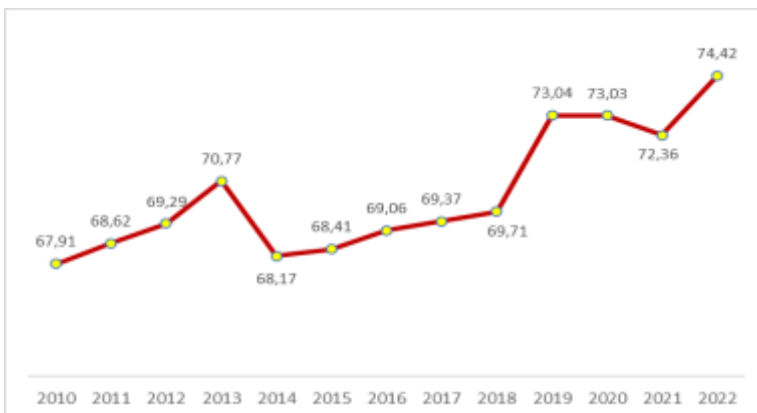
Indeks Pembangunan Gender

perempuan sebesar 7,83 poin dan jarak ini terus mengecil hingga menjadi 6,08 poin pada 2022. Perlambatan ekonomi pada tahun 2016 yang dipicu oleh lesunya perekonomian global ternyata membawa dampak pada melebarnya jarak antara IPM laki-laki dan perempuan.

Dibanding angka IPG, angka IDG relatif lebih berfluktuasi dalam periode 2010-2022. IDG Jawa Timur pernah turun tajam pada tahun 2014 dan pernah naik tajam pada tahun 2019. Fluktuasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan komposisi anggota dewan perempuan di DPRD Jawa Timur.

Dampaknya, peringkat IDG Jawa Timur yang awalnya berada di posisi 8 besar nasional kemudian harus terlempar ke posisi tengah hingga menempati posisi 13 pada tahun 2021 dan kembali naik ke posisi 12 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan Jawa Timur dalam dimensi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan relatif membaik meski nilai IDG mengalami koreksi dalam tiga tahun terakhir.

IDG Jawa Timur yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan kesadaran terhadap kesetaraan fungsi dan posisi perempuan dan laki-laki di terus bertambah. Kontribusi peran dan fungsi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan juga semakin besar



Gambar 8.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Timur Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Lampiran

<https://jarkes.go.id>

Lampiran 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur
2018-2022

Kode	Prov/Kab/Kota	Umur Harapan Hidup					Indeks Kesehatan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten											
3501	Pacitan	71,52	71,77	71,94	72,07	72,48	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81
3502	Ponorogo	72,43	72,65	72,77	72,85	73,2	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82
3503	Trenggalek	73,35	73,59	73,75	73,86	74,26	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83
3504	Tulungagung	73,74	73,95	74,08	74,16	74,54	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84
3505	Blitar	73,16	73,39	73,52	73,61	73,98	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
3506	Kediri	72,37	72,54	72,61	72,65	72,97	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
3507	Malang	72,26	72,45	72,55	72,61	72,95	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81
3508	Lumajang	69,7	69,94	70,1	70,21	70,61	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78
3509	Jember	68,74	68,99	69,15	69,28	69,68	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76
3510	Banyuwangi	70,34	70,54	70,65	70,72	71,06	0,77	0,78	0,78	0,78	0,79
3511	Bondowoso	66,27	66,55	66,74	66,89	67,29	0,71	0,72	0,72	0,72	0,73
3512	Situbondo	68,73	68,97	69,13	69,24	69,62	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76
3513	Probolinggo	66,71	67	67,2	67,36	67,78	0,72	0,72	0,73	0,73	0,74
3514	Pasuruan	70,01	70,17	70,23	70,25	70,55	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
3515	Sidoarjo	73,82	73,98	74,04	74,06	74,36	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84
3516	Mojokerto	72,24	72,43	72,53	72,59	72,93	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81
3517	Jombang	72,04	72,27	72,4	72,49	72,86	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81
3518	Nganjuk	71,25	71,44	71,54	71,6	71,95	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80
3519	Madiun	70,97	71,22	71,38	71,5	71,9	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80
3520	Magetan	72,3	72,49	72,59	72,65	72,97	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81
3521	Ngawi	71,92	72,16	72,3	72,41	72,81	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81
3522	Bojonegoro	71,07	71,36	71,56	71,72	72,16	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80
3523	Tuban	71,01	71,26	71,43	71,56	71,97	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80
3524	Lamongan	72,04	72,27	72,4	72,49	72,86	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81
3525	Gresik	72,46	72,61	72,66	72,67	72,99	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82
3526	Bangkalan	69,94	70,11	70,18	70,22	70,54	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
3527	Sampang	67,79	67,96	68,03	68,07	68,38	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
3528	Pamekasan	67,22	67,45	67,58	67,67	68,03	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74
3529	Sumenep	70,94	71,22	71,41	71,56	71,99	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80
Kota											
3571	Kota Kediri	73,80	73,96	74,02	74,04	74,34	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84
3572	Kota Blitar	73,36	73,60	73,75	73,86	74,26	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83
3573	Kota Malang	72,93	73,15	73,27	73,36	73,75	0,81	0,82	0,82	0,82	0,83
3574	Kota Probolinggo	70,00	70,19	70,29	70,35	70,68	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
3575	Kota Pasuruan	71,18	71,40	71,52	71,60	71,96	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80
3576	Kota Mojokerto	73,01	73,21	73,32	73,39	73,74	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
3577	Kota Madiun	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82
3578	Kota Surabaya	73,98	74,13	74,18	74,18	74,47	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84
3579	Kota Batu	72,37	72,54	72,61	72,65	72,97	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
3500	JAWA TIMUR	70,97	71,18	71,30	71,38	71,74	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80

Lampiran 1 (Lanjutan)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur
2018-2022

Kode	Prov/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah					Rata-rata Lama Sekolah					Indeks Pendidikan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kabupaten																
3501	Pacitan	12,61	12,62	12,64	12,65	12,66	7,19	7,28	7,60	7,61	7,82	0,59	0,59	0,60	0,61	0,61
3502	Ponorogo	13,71	13,72	13,73	13,74	13,76	7,17	7,21	7,54	7,55	7,77	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63
3503	Trenggalek	12,12	12,25	12,35	12,47	12,50	7,27	7,28	7,55	7,56	7,89	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60
3504	Tulungagung	13,05	13,15	13,31	13,32	13,33	8,06	8,07	8,33	8,34	8,65	0,63	0,63	0,65	0,65	0,65
3505	Blitar	12,44	12,45	12,46	12,63	12,64	7,27	7,29	7,39	7,50	7,82	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60
3506	Kediri	12,87	12,88	13,15	13,44	13,61	7,68	8,01	8,02	8,08	8,23	0,61	0,62	0,63	0,64	0,64
3507	Malang	12,87	13,17	13,18	13,24	13,38	7,18	7,27	7,42	7,43	7,68	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62
3508	Lumajang	11,79	11,80	11,81	11,88	12,02	6,21	6,22	6,40	6,67	6,87	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55
3509	Jember	13,21	13,22	13,42	13,43	13,44	6,07	6,18	6,48	6,49	6,50	0,57	0,57	0,59	0,59	0,59
3510	Banyuwangi	12,69	12,78	12,80	13,10	13,11	7,12	7,13	7,16	7,42	7,66	0,59	0,59	0,59	0,61	0,61
3511	Bondowoso	12,95	13,27	13,28	13,29	13,31	5,62	5,71	5,93	5,94	6,22	0,55	0,56	0,57	0,57	0,57
3512	Situbondo	13,01	13,14	13,15	13,16	13,18	6,11	6,12	6,46	6,62	6,63	0,57	0,57	0,58	0,59	0,59
3513	Probolinggo	12,07	12,34	12,35	12,36	12,58	5,71	5,77	6,11	6,12	6,13	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55
3514	Pasuruan	12,30	12,31	12,41	12,58	12,76	6,83	7,11	7,40	7,41	7,42	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60
3515	Sidoarjo	14,75	14,91	14,93	14,94	14,95	10,24	10,25	10,50	10,72	10,77	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77
3516	Mojokerto	12,53	12,61	12,88	12,95	12,96	8,18	8,49	8,51	8,64	8,97	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65
3517	Jombang	12,99	13,00	13,27	13,57	13,58	8,21	8,53	8,54	8,55	8,76	0,63	0,65	0,65	0,66	0,66
3518	Nganjuk	12,84	12,85	12,86	12,87	13,07	7,61	7,63	7,64	7,78	8,12	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62
3519	Madiun	13,13	13,14	13,16	13,17	13,18	7,57	7,80	7,81	7,82	7,94	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63
3520	Magetan	13,73	14,00	14,03	14,04	14,05	7,95	7,96	8,24	8,36	8,66	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67
3521	Ngawi	12,68	12,69	12,70	12,83	12,84	6,88	6,98	7,06	7,26	7,59	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60
3522	Bojonegoro	12,35	12,36	12,39	12,68	12,84	6,77	7,09	7,33	7,38	7,43	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60
3523	Tuban	12,19	12,20	12,21	12,22	12,24	6,52	6,81	6,95	7,18	7,37	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58
3524	Lamongan	13,46	13,47	13,48	13,77	14,01	7,83	7,89	7,92	8,04	8,33	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65
3525	Gresik	13,71	13,72	13,73	13,77	13,96	8,96	9,29	9,30	9,56	9,75	0,68	0,69	0,69	0,70	0,70
3526	Bangkalan	11,58	11,59	11,60	11,73	11,91	5,33	5,66	5,95	5,96	5,97	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52
3527	Sampang	11,76	12,08	12,37	12,38	12,39	4,36	4,55	4,85	4,86	5,06	0,47	0,49	0,51	0,51	0,51
3528	Pamekasan	13,62	13,63	13,64	13,65	13,67	6,35	6,40	6,69	6,70	6,88	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60
3529	Sumenep	13,07	13,19	13,20	13,33	13,51	5,23	5,46	5,71	5,92	5,93	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
Kota																
3571	Kota Kediri	14,96	14,97	15,26	15,27	15,44	9,91	9,92	9,93	10,15	10,45	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76
3572	Kota Blitar	14,02	14,31	14,32	14,33	14,56	9,90	10,10	10,11	10,35	10,65	0,72	0,73	0,73	0,74	0,74
3573	Kota Malang	15,40	15,41	15,51	15,75	15,76	10,16	10,17	10,18	10,41	10,69	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78
3574	Kota Probolinggo	13,56	13,57	13,59	13,60	13,67	8,49	8,69	8,70	8,95	9,29	0,66	0,67	0,67	0,68	0,68
3575	Kota Pasuruan	13,59	13,60	13,62	13,63	13,64	9,10	9,11	9,12	9,33	9,67	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69
3576	Kota Mojokerto	13,82	13,83	14,00	14,01	14,02	9,99	10,24	10,25	10,47	10,80	0,72	0,73	0,73	0,74	0,74
3577	Kota Madiun	14,21	14,39	14,40	14,41	14,43	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78
3578	Kota Surabaya	14,78	14,79	14,80	14,81	14,83	10,46	10,47	10,49	10,50	10,51	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
3579	Kota Batu	14,04	14,12	14,13	14,16	14,40	8,77	9,06	9,07	9,31	9,63	0,68	0,69	0,69	0,70	0,70
3500	JAWA TIMUR	13,10	13,16	13,19	13,36	13,37	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03	0,61	0,62	0,63	0,63	0,64

Lampiran 1 (Lanjutan)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur
2018-2022

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran					Indeks Pengeluaran				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten											
3501	Pacitan	8 527	9 033	8 796	8 887	9 184	0,65	0,67	0,66	0,67	0,68
3502	Ponorogo	9 426	9 883	9 670	9 851	10 199	0,68	0,70	0,69	0,70	0,71
3503	Trenggalek	9 400	9 865	9 630	9 743	10 042	0,68	0,70	0,69	0,69	0,70
3504	Tulungagung	10 455	10 891	10 705	10 807	11 162	0,71	0,73	0,72	0,73	0,73
3505	Blitar	10 327	10 861	10 654	10 757	11 001	0,71	0,73	0,72	0,72	0,73
3506	Kediri	10 853	11 146	11 000	11 127	11 565	0,73	0,73	0,73	0,73	0,75
3507	Malang	9 844	10 270	10 028	10 163	10 326	0,70	0,71	0,70	0,71	0,71
3508	Lumajang	8 931	9 274	9 088	9 203	9 466	0,67	0,68	0,67	0,68	0,68
3509	Jember	9 090	9 525	9 294	9 410	9 840	0,67	0,69	0,68	0,68	0,70
3510	Banyuwangi	11 828	12 264	12 140	12 217	12 320	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77
3511	Bondowoso	10 429	10 665	10 610	10 690	10 851	0,71	0,72	0,72	0,72	0,73
3512	Situbondo	9 692	10 097	9 857	9 996	10 263	0,69	0,70	0,70	0,70	0,71
3513	Probolinggo	10 700	10 972	10 859	10 969	11 254	0,72	0,73	0,73	0,73	0,74
3514	Pasuruan	9 933	10 381	10 164	10 297	10 726	0,70	0,71	0,71	0,71	0,72
3515	Sidoarjo	14 168	14 609	14 458	14 578	14 808	0,81	0,82	0,81	0,82	0,82
3516	Mojokerto	12 454	12 860	12 779	12 844	13 051	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
3517	Jombang	10 999	11 533	11 261	11 394	11 579	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75
3518	Nganjuk	11 768	12 200	12 130	12 172	12 349	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77
3519	Madiun	11 351	11 650	11 574	11 658	11 848	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75
3520	Magetan	11 539	11 779	11 776	11 833	12 031	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
3521	Ngawi	11 187	11 468	11 418	11 459	11 563	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75
3522	Bojonegoro	9 926	10 265	10 121	10 221	10 323	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71
3523	Tuban	10 048	10 499	10 238	10 380	10 703	0,70	0,72	0,71	0,71	0,72
3524	Lamongan	11 108	11 572	11 456	11 510	11 648	0,73	0,75	0,74	0,74	0,75
3525	Gresik	12 845	13 295	13 246	13 280	13 384	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79
3526	Bangkalan	8 393	8 718	8 610	8 673	8 971	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67
3527	Sampang	8 569	8 760	8 739	8 790	8 944	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67
3528	Pamekasan	8 536	8 834	8 739	8 804	8 967	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67
3529	Sumenep	8 722	9 082	8 888	9 000	9 388	0,66	0,67	0,67	0,67	0,68
Kota											
3571	Kota Kediri	11 976	12 440	12 239	12 359	12 762	0,76	0,77	0,76	0,77	0,78
3572	Kota Blitar	13 391	13 851	13 733	13 816	14 058	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81
3573	Kota Malang	16 158	16 666	16 593	16 663	16 897	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86
3574	Kota Probolinggo	11 796	12 280	12 180	12 245	12 571	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77
3575	Kota Pasuruan	12 931	13 393	13 281	13 354	13 803	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80
3576	Kota Mojokerto	13 155	13 710	13 499	13 610	14 054	0,79	0,80	0,79	0,80	0,81
3577	Kota Madiun	15 616	16 040	16 018	16 095	16 503	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85
3578	Kota Surabaya	17 157	17 854	17 755	17 862	18 345	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89
3579	Kota Batu	12 466	12 870	12 824	12 887	13 094	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
3500	JAWA TIMUR	11 380	11 739	11 601	11 707	11 992	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76

Lampiran 1 (Lanjutan)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur
2018-2022

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan IPM				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten											
3501	Pacitan	67,33	68,16	68,39	68,57	69,37	1,23	1,24	0,33	0,28	1,17
3502	Ponorogo	69,91	70,56	70,81	71,06	71,87	0,93	0,93	0,36	0,36	1,14
3503	Trenggalek	68,71	69,46	69,74	70,06	71,00	0,89	1,09	0,41	0,45	1,34
3504	Tulungagung	71,99	72,62	73,00	73,15	74,06	1,05	0,87	0,52	0,21	1,24
3505	Blitar	69,93	70,57	70,58	71,05	71,86	0,86	0,92	0,01	0,66	1,14
3506	Kediri	71,07	71,85	72,05	72,56	73,46	0,86	1,09	0,28	0,71	1,24
3507	Malang	69,40	70,35	70,36	70,60	71,38	1,35	1,37	0,01	0,34	1,10
3508	Lumajang	64,83	65,33	65,46	66,07	66,95	0,94	0,77	0,19	0,93	1,33
3509	Jember	65,96	66,69	67,11	67,32	67,97	1,53	1,11	0,64	0,31	0,88
3510	Banyuwangi	70,06	70,60	70,62	71,38	71,94	0,59	0,78	0,02	1,08	0,78
3511	Bondowoso	65,27	66,09	66,43	66,59	67,31	0,81	1,24	0,51	0,25	1,19
3512	Situbondo	66,42	67,09	67,38	67,78	68,25	1,13	1,00	0,43	0,60	0,69
3513	Probolinggo	64,85	65,60	66,07	66,26	66,96	0,88	1,16	0,71	0,29	1,06
3514	Pasuruan	67,41	68,29	68,60	68,93	69,68	1,08	1,31	0,45	0,49	1,09
3515	Sidoarjo	79,50	80,05	80,29	80,65	81,02	1,01	0,70	0,30	0,45	0,46
3516	Mojokerto	72,64	73,53	73,83	74,15	74,89	0,39	1,22	0,41	0,43	1,00
3517	Jombang	71,86	72,85	72,97	73,45	74,05	1,38	1,38	0,16	0,66	0,82
3518	Nganjuk	71,23	71,71	71,72	71,97	72,93	0,77	0,66	0,02	0,35	1,33
3519	Madiun	71,01	71,69	71,73	71,88	72,39	1,06	0,95	0,06	0,21	0,71
3520	Magetan	72,91	73,49	73,92	74,15	74,85	0,42	0,81	0,58	0,32	0,94
3521	Ngawi	69,91	70,41	70,54	71,04	71,75	0,92	0,70	0,20	0,70	1,00
3522	Bojonegoro	67,85	68,75	69,04	69,59	70,12	0,86	1,32	0,43	0,79	0,76
3523	Tuban	67,43	68,37	68,40	68,91	69,67	1,00	1,39	0,04	0,75	1,10
3524	Lamongan	71,97	72,57	72,58	73,12	74,02	1,21	0,83	0,01	0,75	1,23
3525	Gresik	75,28	76,10	76,11	76,50	77,16	0,59	1,10	0,01	0,51	0,86
3526	Bangkalan	62,87	63,79	64,11	64,36	65,05	0,91	1,46	0,50	0,39	1,07
3527	Sampang	61,00	61,94	62,70	62,80	63,39	1,84	1,53	1,23	0,16	0,94
3528	Pamekasan	65,41	65,94	66,26	66,40	66,99	0,75	0,81	0,48	0,21	0,89
3529	Sumenep	65,25	66,22	66,43	67,04	67,87	1,50	1,49	0,31	0,92	1,24
Kota											
3571	Kota Kediri	77,58	78,08	78,23	78,60	79,59	0,59	0,64	0,19	0,48	1,22
3572	Kota Blitar	77,58	78,56	78,57	78,98	79,93	0,62	1,27	0,01	0,52	1,20
3573	Kota Malang	80,89	81,32	81,45	82,04	82,71	0,29	0,54	0,16	0,72	0,82
3574	Kota Probolinggo	72,53	73,27	73,27	73,66	74,56	0,60	1,02	0,00	0,54	1,22
3575	Kota Pasuruan	74,78	75,25	75,26	75,62	76,54	0,52	0,63	0,01	0,48	1,22
3576	Kota Mojokerto	77,14	77,96	78,04	78,43	79,32	0,48	1,06	0,10	0,50	1,13
3577	Kota Madiun	80,33	80,88	80,91	81,25	82,01	0,25	0,67	0,05	0,41	0,94
3578	Kota Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74	0,83	0,59	0,01	0,10	0,52
3579	Kota Batu	75,04	75,88	75,90	76,28	77,22	1,05	1,11	0,03	0,51	1,23
3500	JAWA TIMUR	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75	0,72	1,03	0,29	0,60	0,85

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43-44, Surabaya 60292

Telp. (031) 8439343, Fax. (031) 8494007, 8471143

E-Mail: bps3500@bps.go.id